



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN
PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH
SERTA ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016 - 2018**

SKRIPSI

Oleh :

Heni Rizza

NPM : 4316500071

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
2020**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN
PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH
SERTA ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016 - 2018**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal**

Oleh :

Heni Rizza

NPM : 4316500071

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2020



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN
PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH
SERTA ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016 - 2018**

SKRIPSI

Oleh :

Heni Rizza

NPM : 4316500071

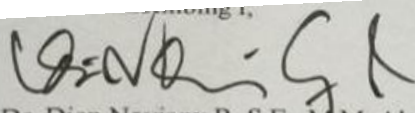
Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal : 30 Juni 2020

Dosen Pembimbing I,


Dr. Dewi Indriasih, SE.MM
NIDN. 0616058002

Dosen Pembimbing II,


Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M, Ak.CA
NIDN.0628117502

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Aminul Fajri, SE.M.Si.
NIDN. 0602037002

Pengesahan Skripsi

Nama : Heni Rizza
NPM : 4316500071
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018.

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2020

Ketua Penguji

Dr. Dewi Indrasih, SE.MM
NIDN. 0616058002

Penguji I,

Yanti Puji Astutie, SE.M.Si
NIDN. 0014097401

Penguji II

Aminul Fajri, SE. M.Si
NIDN. 060203 7002

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Aminul Fajri, SE.M.Si
NIDN. 0602037002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *Jangan membenci apa yang tidak kamu ketahui, karena sebagian besar pengetahuan terdiri dari apa yang tidak kamu ketahui.*
(- Ali bin Abi Thalib -)
- ❖ *Di manapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. (- BJ Habibie -)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah
kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ *Ibuku terkasih, yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a.*
- ❖ *Suami dan anak-anaku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi, semangat selama ibu menuntut ilmu.*
- ❖ *Dosen – dosen pengajar dan pembimbing, terima kasih atas semua bimbingan dan pembelajarannya selama ini.*
- ❖ *Teman – teman se angkatan dan semua pihak yang telah membantu selama melakukan penelitian ini.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Rizza

NPM : 4316500071

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018. “

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau pemalsuan data maupun bentuk – bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengijinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Tegal, Juni 2020

Yang menyatakan,

 
Heni Rizza

ABSTRAK

Heni Rizza, 2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018. Skripsi Tegal : Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Belanja Daerah Serta analisis *flypaper effect* di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2018.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 35 Kabupaten/Kota selama 3 tahun (2016 – 2018). Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, alat analisis yang digunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan untuk fenomena *flypaper effect* tidak terjadi pada Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2016 - 2018. Ini dibuktikan dengan hasil uji analisis data bahwa nilai koefisien standar beta Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,594 dengan nilai t hitung sebesar 17.747 lebih besar dari nilai koefisien standar beta Dana Alokasi Umum sebesar 0,550 dengan nilai t hitung sebesar 16.452.

Kata Kunci : PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Daerah serta Flypaper Effect

ABSTRACT

Heni Rizza, 2020, The Effect of Regional Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Tax and Non-Tax Profit Sharing Funds on Regional Spending and Analysis of Flypaper Effect in Central Java Province 2016 - 2018. Thesis of Tegal: Faculty of Economics, Pancasakti University, Tegal 2020 .

The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Tax and Non-Tax Profit Sharing Funds, and flypaper effect analysis on Regional Expenditures in Central Java Province in 2016 - 2018.

This research is in the form of quantitative descriptive research, the data collection method used is documentation, population and sample in this study is the realization of the district / city budget in Central Java Province, as many as 35 districts / cities for 3 years (2016 - 2018). The data analysis method uses descriptive statistical analysis, the analytical tool used is multiple linear regression.

The results showed that the Regional Own Revenue, the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund, the Revenue Sharing Fund positively affected Regional Expenditures, while the flypaper effect did not occur in Regional Expenditures in Central Java Province for the year 2016 - 2018. This was evidenced by the results data analysis test that the value of the beta standard coefficient of Original Local Revenue is 0.594 with a t value of 17.747 greater than the standard coefficient of beta of the General Allocation Fund of 0.550 with a value of t arithmetic of 16,452.

Keywords: PAD, DAU, DAK, DBH, *Regional Expenditures and Flypaper Effect*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, SE.MM.Akt, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Aminul Fajri, SE.M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Dewi Indriasih, SE.MM. selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Dr. Dien Noviany Rahmatika, SE.MM.Akt, CA, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi peneliti.

Kami menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian untuk skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap penelitian skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak – pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, Juni 2020

Heni Rizza

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Teori Pengelolaan (Steward Teory)	13
2. APBD	14
3. PAD	16
4. Dana Perimbangan	20
5. Flypaper Effect	25

5. Belanja Daerah	27
B. Studi Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pemikiran	37
D. Perumusan Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Metode Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	45
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variable	46
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Teknik Pengolahan Data	48
F. Metode Analisis Data	49
1. Analisis Statistik Deskriptif	49
2. Uji Asumsi Klasik	50
3. Uji Hipotesis	53
4. Analisis Regresi Linear Berganda	55
5. Analisis Flypaper Effect	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum	57
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
C. Keterbatasan Peneliti	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 : Alokasi Anggaran Sosial Ekonomi dan Pelayanan Umum Provinsi Jawa Tengah - Tahun 2018	3
2 : Studi Penelitian Terdahulu	35
3 : Operasional Variabel	46
4 : Hasil Deskriptif Statistik Variabel	61
5 : Hasil Uji Normalitas	65
6 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
7 : Hasil Uji Multikolineritas	68
8 : Hasil Uji Autokolerasi	69
9 : Hasil Uji - f	69
10 : Hasil Uji - t	71
11 : Hasil Uji Koefisien Determinasi	72
12 : Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	73
13 : Hasil Uji Regresi Pengaruh PAD dan DAU	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 : Kerangka Pemikiran	42
2 : Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah	58
3 : Gambar Uji Normalitas P-Plot	64
4 : Gambar Uji Heteroskedastisitas	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Data jumlah penerimaan PAD,DAU,DAK,DBH Pajak dan Bukan Pajak, Belanja Daerah.....	91
2 : Hasil perhitungan tabulasi data statistik	99
3 : Data Keuangan Lampiran V (Perda APBD TA. 2018).....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah sebagai penyelenggara roda pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Susunan pemerintahan pusat terdiri dari tingkat pemerintahan daerah, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 membagi kembali Pemerintahan Daerah menjadi tingkat yang lebih kecil dengan membentuk pemerintahan desa. (Khoiri, 2015)

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah / provinsi yang baik harus menjadi dasar suatu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara akuntabel dan transparan, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. (Arfianti, *et al.*, 2011).

Prinsip desentralisasi didefinisikan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam UU No 23. Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan otonomi daerah membawa implikasi dalam proses pembangunan daerah yaitu perubahan pola penerimaan dan pengeluaran daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Amanat dari undang - undang menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah / provinsi yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi khusus (DAK) dan Dana Bagi hasil (DBH) yang pelaksanaan kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah. (Cahyani, 2018).

Pengaturan pendapatan dan pengeluaran suatu daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat suatu rancangan keuangan daerah yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah selaku eksekutif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Tujuan dari APBD supaya pemerintah daerah/provinsi dapat memperkirakan berapa besar jumlah pendapatan yang akan diterima dan jumlah pengeluaran yang akan dibelanjakan. (Khoiri, 2015). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dijadikan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program yang merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut (Mardiasmo, 2009:62) terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu anggaran

merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber.

Di Provinsi Jawa Tengah untuk APBD Tahun 2018 alokasi anggaran untuk pelayanan umum, pembangunan ekonomi dan sosial mencapai Rp. 15.807.076.244.000,- atau sebesar 60,36 % dari seluruh anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Secara lebih rinci alokasi anggaran pelayanan umum, pembangunan ekonomi dan sosial disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Alokasi Anggaran Sosial Ekonomi dan Pelayanan Umum
Provinsi Jawa Tengah - Tahun 2018

No.	Bidang	Jumlah Anggaran
1.	Pelayanan umum	Rp. 14.360.759.102.000,-
2.	Pembangunan Ekonomi	Rp. 1.107.031.507.000,-
3.	Pembangunan Sosial	Rp. 339.285.635.000,-
	Jumlah	Rp. 15.807.076.244.000,-

Sumber : Lampiran V Perda Jawa Tengah Tahun 2018

Besarnya anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Apabila komposisi anggaran tidak ideal maka pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan

infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal pemerintah pusat sudah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah. (Mardiasmo, 2009)

Selain dana perimbangan, pemerintah daerah / provinsi mempunyai sumber pendapatan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. (Asari, *et al.*, 2018)

Tujuan PAD sebagai perwujudan prinsip desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerahnya, beberapa komponen PAD tersebut untuk pajak daerah dan retribusi daerah perlu mendapatkan perhatian tersendiri, karena kedua jenis PAD tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan membebani masyarakat. Apabila PAD meningkat, maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan diharapkan bisa meningkatkan tingkat kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah lebih mempunyai inisiatif untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi daerahnya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Tambunan, 2015)

Indikasi yang kuat jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah / provinsi meningkat maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal mengalami suatu peningkatan. (Adiputra, 2014). Pendapatan asli

daerah secara umum belum bisa menopang belanja daerah sehingga dana transfer dari pemerintah pusat digunakan sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Tujuan dana transfer untuk mengurangi kesenjangan fiskal di antara pemerintah daerah dan menjamin terselenggaranya standar pelayanan publik minimum, maka pemerintah daerah / provinsi dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat melalui APBD yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan mengalokasikan anggaran yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang ada di daerah. (Mulyati, *et al.*, 2018)

Dalam UU No. 33 tahun 2004 disamping pendapatan daerah dalam APBD tercantum belanja daerah, yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dipergunakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dalam suatu bagian atau bidang tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Secara umum belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak terduga. Dalam struktur anggaran daerah berbasis kinerja, belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi kelompok, dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi yaitu suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah serta lembaga teknis daerah lainnya. Menurut fungsinya belanja daerah meliputi untuk pendidikan, kesehatan, dan fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya

belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Berdasarkan jenisnya misalnya belanja pegawai pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain. (Mulyati, *et al.*, 2018).

Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan dan dialokasikan minimal 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan oleh APBN. Kebutuhan DAU suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau kota ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah dengan potensi daerahnya, DAU digunakan untuk menutup celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari penerimaan daerah yang ada. (Rahmawati, 2010).

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD maupun diluar DAU dan DAK. (Astutik, 2016).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / sumber daya alam. Dalam UU PPh yang baru No. 17 Tahun 2000, daerah memperoleh dana bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) yang diberlakukan mulai tahun anggaran 2001, diberikan sebagai bentuk kompensasi dan penyeimbang bagi daerah yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN) tetapi tidak memiliki sumber daya alam. Besaran perolehan pajak di daerah berkaitan erat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak. DBH sumber daya alam bersumber dari kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi. (Mulyati, *et al.*, 2018).

Fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah Pemprov menargetkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar 12,71 triliun dan tahun 2018 sebesar 14,25 triliun, hal itu lebih kecil dari target pendapatan RPJMD sebelum perubahan yaitu tahun 2017 sebesar 13,72 triliun dan tahun 2018 sebesar 15,55 triliun. (www.solopos.com, 2016).

Penurunan PAD ini kurang rasional karena Pemerintah Provinsi bisa lebih menggali sumber – sumber pajak yang lebih insentif. Pendapatan masih berpusat pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB), untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok belum dioptimalkan dengan baik. Dana transfer berupa Dana Alokasi Umum yang direncanakan tahun 2018 sebesar 1,89 triliun meningkat menjadi 5,83 triliun pada tahun 2017 dan 2018, itu bukan alasan untuk menurunkan target PAD, kemandirian daerah sangat dibutuhkan dalam aspek penerimaan harus tetap menjadi prioritas. Dari faktor tersebut yaitu peningkatan pajak daerah dan peningkatan DAU seharusnya berimplikasi pada peningkatan target PAD Provinsi Jateng tahun 2017 – 2018. (www.solopos.com, 2016)

Flypaper effect atau kertas kerja layang merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana perimbangan yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, untuk kepentingan belanja daerah dari pada menggunakan Pendapatan Asli Daerah. (Adiputra, 2014).

Flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa dana transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi semakin meningkatnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Nurdini, *et al.*, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan Variabel Pendapatan Asli, Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muh Rohiqul Azhar (2018), Widi Angga Kurniawan (2016), dan Rifki Hasan Al Khoiri (2015), Sa'diyah dan Puri (2015), Masayu dan Catur (2015), Rini Nurdini, *et al* (2015), Sri Mulyati (2018), Melia Gita Cahyani (2018) yang menyatakan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja Daerah.

Hal yang berbeda didapat dari penelitian Panji dan Indrajaya (2016) yang meneliti pengaruh Dana Perimbangan di Provinsi Bali, menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis tertarik juga untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah ?

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah ?
5. Apakah terjadi *Flypaper Effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk mengetahui apakah terjadi *Flypaper Effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini maka diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bagi khasanah ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi untuk memperkaya studi empiris yang terkait dengan belanja daerah ditinjau berdasarkan faktor Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta *Flypaper effect*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan dalam menyusun kebijakan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dan menggali potensi pendanaan sumber daya yang ada.
- b. Bagi institusi akademis khususnya institusi Universitas Pancasakti Tegal dapat memperkaya khasanah pustaka dan memberikan tambahan referensi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Belanja Daerah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan referensi dan solusi dalam memecahkan masalah, menelaah, mengkaji, meneliti persoalan Belanja Daerah ditinjau dari perspektif Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, serta *Flypaper Effect*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

Theory yang mendasari penelitian ini adalah stewardship theory. Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. Hal itu ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan non profit lainnya yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan principal. Dengan demikian manajemen di lingkungan

pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agent karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat relevan jika teori stewardship diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik, khususnya Pemerintahan .

Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini adalah para pengelola anggaran yang ada di pemerintahan diharapkan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan principal yaitu masyarakat dan instansi mereka sehingga Pengelolaan Anggaran di Provinsi Jawa Tengah dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab itu pengelola diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusianya dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah harus punya suatu rancangan matang yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara demi mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rancangan keuangan

tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama antara Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan daerah (Perda).

Ada beberapa definisi atau pengertian anggaran menurut (Astutik, 2016), antara lain :

- a. APBD merupakan gambaran segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan / pendapatan dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan untuk pengeluaran daerah yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan yang berdasarkan atas realisasi anggaran di masa lalu.
- b. APBD merupakan rencana kerja operasional pemerintah daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteritis dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan akan disepakati yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Struktur APBD provinsi / kabupaten / kota merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah semua pendapatan atau penerimaan yang masuk ke kas daerah yang diperoleh dari sumber dalam wilayah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna keperluan daerah itu sendiri. Menurut (Yani, 2008). PAD merupakan salah satu komponen penerimaan / pendapatan disamping dana perimbangan yang berupa (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengukuran atau indikator Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran suatu daerah baik itu Provinsi / Kabupaten / Kota.

Olubukunela dalam (Wati, *et al.*, 2017) menyatakan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Sedangkan menurut (Idris, 2016). Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan PAD jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pendapatan pajak itu sendiri.

(Simanjuntak, *et al.*, 2013) menjelaskan “*Regional Original Income is a representation of the revenue generated by the regional*”, dimana pendapatan asli daerah merupakan representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah maka akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat korelasi yang positif antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Pada dasarnya semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, hal ini menandakan semakin kecilnya ketergantungan regional terhadap sentral sebagai dampak adanya implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggung jawab. (Rinaldi, 2012).

Adapun jenis-jenis pendapatan yang dapat diklasifikasikan sebagai PAD Provinsi / kabupaten / Kota menurut UU No. 33. Tahun 2004 antara lain :

- a. Pajak daerah : Sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah menerangkan bahwa pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi meliputi: pajak kendaraan

bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, sedangkan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten / Kota diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C serta pajak parkir.

- b. Retribusi daerah : menurut UU No. 28. Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau untuk diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah meliputi: retribusi jasa umum meliputi : pelayanan kesehatan, kebersihan/persampahan, penggantian cetak KTP/Akte catatan sipil, pemakaman dan pengabuan mayat, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian cetak peta, pengujian kapal perikanan. b) retribusi jasa usaha meliputi : pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, penginapan/villa, penyedotan kakus, rumah potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi olah raga, penyeberangan di atas air, pengolahan limbah cair, penjualan produksi usaha daerah, c) retribusi perizinan tertentu meliputi: izin mendirikan bangunan, izin trayek, izin gangguan, dan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

- c. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan : Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, yang dimaksud hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari: a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD); b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN); c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah : Sesuai ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi: a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b) jasa giro; c) pendapatan bunga; d) penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah; e) penerimaan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah; f) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h) pendapatan denda pajak; i) pendapatan denda, retribusi; j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k) pendapatan dari pengembalian; l) fasilitas sosial dan umum; m) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; n) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

4. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah, yang dimaksud dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan proporsional, demokratis dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelola dan pengawasan keuangan.

Menurut (Wati, *et al.*, 2017) menjelaskan bahwa, Dimana mekanisme utama untuk transfer antar pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ada berbagai macam sistem transfer tanpa syarat (umum) digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal. Transfer dengan syarat (khusus) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai layanan tertentu, seperti pendidikan dasar, pelayanan sosial dan jalan.

(Nasution, 2015) menyatakan bahwa, dana transfer / bantuan kepada pemerintah daerah yaitu sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Transfer dana perimbangan tersebut digunakan untuk mengatasi ketidak seimbangan horisontal diantara pemerintah daerah. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, serta dana bagi hasil bukan pajak, dalam Dana Perimbangan tingkat pengukuran atau indikatornya dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah baik Provinsi / Kabupaten / Kota. Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan pemerintah. Belanja daerah sangat dipengaruhi ketergantungannya oleh transfer dari pemerintah pusat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah menjadi semacam insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Atika, 2015).

Sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka dalam pendanaan penyelenggaraan desentralisasi diatur pembagian keuangan sebagai dana perimbangan (*grants*) antar pemerintah pusat dengan daerah secara adil, proporsional transparan, dan bertanggung jawab.

Komponen dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil:

a. Dana Alokasi Umum (DAU):

Menurut UU No 33. Tahun 2004, Dana alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU yang besar akan diberikan pada daerah yang kemampuan fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar. Sehingga secara implisit bisa dikatakan prinsip tersebut menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum adalah sebagai instrumen pemerataan kapasitas fiskal.

Rumusan yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU terhadap Provinsi / kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

Dana alokasi Umum (DAU) = Alokasi dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

Dimana:

$$CF = KbF - KpF \text{ (Selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal)}$$

$$KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB/kap)$$

Keterangan:

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

α = Bobot Indeks

TBR = Total Belanja rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB = Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Adapun rumusan Kapasitas Fiskal adalah sebagai berikut:

$$KpF = PAD + DBH P + DBH BP$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH P = Dana Bagi hasil Penerimaan Pajak

DBH BP = Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus didefinisikan sebagai jenis transfer dana perimbangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan dimuat dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk perhitungan alokasi DAK menggunakan rumusan di bawah ini:

$$DAK = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$

Dimana:

Penerimaan Umum = $PAD + DAU + (DBH - DBH DR)$

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Dana perimbangan yang terdiri atas DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil merupakan pendanaan desentralisasi yang alokasi nya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan saling mengisi dan melengkapi. Untuk kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan (Perpu) dan karakteristik daerah. Perpu merupakan undang-undang yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah misalnya Undang-Undang Otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua, sehingga dalam hal ini seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua akan diprioritaskan mendapatkan dana alokasi khusus.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan prinsip desentralisasi. Menurut (Halim, *et al.*, 2009) untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dengan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antar pemerintah

pusat dan daerah. Mekanisme pendistribusian dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur berdasarkan peraturan menteri dalam negeri. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / sumber daya alam. Berdasarkan UU PPh yang baru yaitu UU No 17 Th. 2000, daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) yang diberlakukan mulai tahun anggaran 2001.

Hal itu sebagai bentuk kompensasi dan penyeimbang bagi daerah yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN) tetapi tidak memiliki sumber daya alam. Besaran perolehan pajak di daerah berkaitan erat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak. Sedangkan penerimaan DBH sumber daya alam bersumber dari, Kehutanan, pertambangan umum, Pertambangan minyak bumi, pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Mulyati, *et al.*, 2018).

5. *Flypaper Effect*

Flypaper Effect atau efek kertas kerja layang dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih besar (lebih boros) dengan menggunakan dana alokasi umum yang berasal dari dana transfer (*grants*) dari pada

menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD. (Adiputra, 2014). Pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah tentu masih mengharapkan adanya transfer dana yang lebih besar dari pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi adalah ketika pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal dan biaya pembangunan karena terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang selanjutnya disebut dengan istilah *flypaper effect* (Fajar, 2016).

Adapun dampak yang terjadi dengan adanya fenomena *flypaper effect* diantaranya:

1. Menyebabkan terjadinya ketergantungan kepada pemerintah pusat.
2. Menimbulkan terjadinya celah kepincangan fiskal (*fiscal gap*).
3. Mengakibatkan tidak maksimalnya pemanfaatan sumber daya alam sebagai komponen pertumbuhan PAD.
4. Menyebabkan kemampuan keuangan daerah menjadi kurang mandiri.
5. Terjadinya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer.

Ketentuan terjadinya fenomena *flypaper effect* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila PAD dan DAU sama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah maka bisa dilihat dari efek atau nilai

koefisien regresi DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada efek atau nilai koefisien regresi PAD, maka bisa disimpulkan telah terjadi *flypaper effect*.

- b. Apabila PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan telah terjadi *flypaper effect* (Wulansari, 2015).

6. Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mendefinisikan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendanaan urusan wajib menjadi prioritas dari belanja daerah, yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan ketetapan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Mardiasmo, 2009) belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dipergunakan oleh provinsi dan kabupaten/kota guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah dalam suatu bagian atau bidang tertentu pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

(Wati, *et al.*, 2017) berpendapat bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai maka sebaiknya kepentingan masyarakat daerah lebih diutamakan dalam belanja pemerintah daerah.

Menurut (Simanjuntak, *et al.*, 2013) ,”*Regional expenditure is all expending of regional’s cash in a one budget period*”. Menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri.

b. Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan permendagri No 13 Tahun 2006 belanja daerah dapat diklasifikasikan antara lain:

1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah

Belanja daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

2. Klasifikasi menurut fungsi:

Terdiri dari pelayanan umum, pendidikan, budaya, kesehatan, ekonomi, ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan sosial, dan pariwisata.

3. Klasifikasi menurut organisasi

Disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

4. Klasifikasi menurut program dan kegiatan

Disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah juga dapat dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL):

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain: Belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung (BL):

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya, yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau bahan perbandingan yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, serta analisis fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah. Beberapa penelitian terdahulu tersebut secara ringkas diantaranya adalah sebagai berikut ini :

(Wulansari, 2015) Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah. *Flypaper effect* akan dianalisis pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dalam periode tahun 2012-2013 . Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PAD, DAU, serta DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah. hipotesis kelima menyimpulkan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja

daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, hal ini terjadi karena pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

(Khoiri, 2015) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah baik secara Parsial dan Simultan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dan juga untuk mengetahui apakah telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Populasi yang digunakan sebanyak 26 kabupaten/kota selama periode LKPD 2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode panel data atau *Pooled Least Square* (PLS). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah, dengan nilai probabilitasnya yaitu PAD sebesar $0,000 < 0,005$, DAU = $0,000, 0,005$, serta DAK = $0,02, 0,005$. Sedangkan secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dengan nilai probabilitasnya $0,00, 0,005$. Fenomena *flypaper effect* tidak terjadi, karena PAD mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap besaran belanja daerah pada tahun berikutnya.

Penelitian dari (Fajar, 2016) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi fenomena *flypaper effect*, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus pada belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Bali, teknik penentuan sampel penelitian ini adalah sampling jenuh karena seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel penelitian. Alat analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasilnya menunjukkan PAD, DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, PAD, DAU, DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian dari (Nurdini, *et al.*, 2015) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Secara parsial, DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun DAK tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Jawa Barat dan telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Penelitian dari (Wati, *et al.*, 2017) dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah serta dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Pemkot Bandung. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan jenis penelitian deskriptif verifikatif. Analisis data dilakukan pada laporan realisasi APBD selama 12 periode dari tahun 2004 s/d 2015. Berdasarkan hasil analisis korelasi menyimpulkan bahwa antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah terjadi hubungan yang sangat kuat, demikian juga dengan hubungan antara dana perimbangan dengan belanja daerah. Uji Hipotesis menunjukkan bahwa antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah secara simultan terjadi pengaruh yang signifikan.

Penelitian dari (Wahyuni, *et al.*, 2017) yang meneliti tentang *Flypaper effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif statistik dan Regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah sedangkan Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dan telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2018.

Penelitian dari (Asari, *et al.*, 2018) yang meneliti Pengaruh Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah pada belanja daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* melalui kriteria-kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel sebanyak 60 sampel. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji kelayakan model penelitian dengan *significance level* 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan berpengaruh positif pada belanja daerah.

Penelitian dari (Mulyati, *et al.*, 2018) penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal, serta pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh.

Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 69 laporan keuangan pemerintah daerah berupa data APBD pada 23 Kabupaten/Kota selama periode 2013 s/d 2015. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah secara simultan, sedangkan secara parsial dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah, serta dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan (Azhar, 2018) dengan tujuan untuk menganalisis *Flypaper effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sampel menggunakan total sampling (sampel jenuh) yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampelnya. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan nilai t statistik DAU lebih besar dari nilai t statistik PAD hal ini menunjukkan terjadi fenomena *flypaper effect*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, *et al.*, 2019) pada penelitian ini untuk menguji apakah DAU, DAK, PAD berpengaruh terhadap belanja daerah dan apakah terjadi *flypaper effect* di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur serta apakah terjadi *flypaper effect* dengan nilai PAD tinggi atau

sebaliknya dengan nilai PAD yang rendah di Kabupaten / Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data dalam hal ini menggunakan data panel yang dikumpulkan dari Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur, metode analisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitiannya bahwa variabel PAD, DAU, DAK terdapat hubungan yang signifikan terhadap belanja daerah di 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Untuk analisa *flypaper effect* terjadi pada 34 Kab/Kota, sedangkan 4 Kab/Kota yang tidak menunjukkan gejala *flypaper effect* diantaranya Kota Malang, Surabaya, Tulungagung dan Jember. Gejala *flypaper effect* disebabkan dalam akumulasi anggaran dan belanja daerah 34 Kab/Kota komposisi kontribusi PAD lebih rendah dari DAU.

Dan dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Studi Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang dan Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Desi Tri wulansari (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis <i>Flypaper Effects</i> (Studi kasus Pada Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat Tahun 2012-2013	Analisis Regresi linear berganda	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah, serta terjadi <i>Flypaper Effect</i>
2	Rifki Hasan Al Khoiri (2015) <i>Flypaper Effects</i> Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	<i>Pooled Least Square</i>	Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah

			dan tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i> .
3	Rini Nurdini, Adi Wiratno dan Yusriati Nur Farida (2015) <i>Analisis Flypaper Effect</i> pada dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), Dana bagi hasil (DBH), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (BD) di Kab / kota di Jawa Barat.	Analisis linier berganda	Secara parsial, DAU, DBH dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun DAK tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.
4	Made Fajar Paramartha dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) <i>Flypaper Effect</i> , Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus Pada Belanja Modal.	Analisis linier berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.
5	Masayu Rahmawati & Catur Martian Fajar (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung th.2004-2015	Analisis Korelasi	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berhubungan sangat erat terhadap Belanja daerah
6	Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017) <i>Flypaper Effect</i> pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016.	Analisis Regresi linear berganda	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, dan terjadi <i>Flypaper Effect</i>

7	Ni Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan, dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Belanja Daerah	Analisis Regresi linear berganda	Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan, dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara simultan berpengaruh positif pada belanja daerah
8	Sri Mulyati dan Yusriadi (2018) Dana Bagi hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh	Analisis Regresi linear berganda	Dana bagi hasil dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Belanja daerah baik secara parsial maupun simultan.
9	Muh Rohiqul Azhar (2018) <i>Flypaper Effects</i> Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Regresi linear berganda	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana alokasi umum dan Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja modal dan terjadi <i>Flypaper Effect</i>
10	Rony Kurniawan, Danang Wahyu W, Thomas David S (2019). Analisis <i>Flypaper Effect</i> Dana Transfer dan PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Jawa Timur	Analisis Regresi Linear berganda	Pendapatan asli daerah, DAU, dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja daerah

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang didefinisikan sebagai hal yang penting, dengan kata lain kerangka berpikir merupakan pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya atau pemahaman yang paling mendasar

yang menjadi pondasi bagi suatu pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. (Sugiyono, 2016).

Adapun penggambaran dari kerangka pemikiran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang didapatkan dari sumber-sumber ekonomi dalam daerahnya sendiri. (Mardiasmo, 2009) berpendapat bahwa dengan semakin tingginya pendapatan asli daerah maka belanja daerah akan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan (Asari, *et al.*, 2018) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung dengan menggunakan sampel sejumlah 60 laporan keuangan. Dari hasil teknik analisis data berupa analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah Kabupaten Bandung periode 2012-2016.

Hal tersebut didukung oleh (Wati, *et al.*, 2017) yang menguji pengaruh pendapatan asli daerah serta dana perimbangan terhadap belanja daerah pada laporan realisasi APBD Pemkot Bandung selama 12 periode dari tahun 2004 - 2015. Berdasarkan hasil analisis korelasi menyimpulkan bahwa antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah terjadi hubungan yang sangat kuat.

Uji Hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Hal yang sama dikemukakan oleh (Wulansari, 2015).

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi Umum dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU yang relatif lebih besar akan diberikan kepada daerah yang kemampuan fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar. Sehingga secara implisit bisa dikatakan prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU adalah sebagai instrumen pemerataan kapasitas fiskal.

Studi dari (Kurniawan, *et al.*, 2019) yang meneliti pengaruh PAD terhadap belanja daerah dengan menggunakan populasi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam periode 2011-2013. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Variabel Dana Alokasi Umum lebih berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Hal itu didukung pula oleh (Azhar, 2018) dengan menggunakan populasi dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sampel menggunakan total sampling (sampel jenuh) yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampelnya. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap

Belanja Modal, dan nilai t statistik DAU lebih besar dari nilai t statistik PAD hal ini menunjukkan terjadi fenomena *flypaper effect*. Pendapat yang sama dikemukakan oleh (Wahyuni, *et al.*, 2017) serta (Astutik, 2016) yang berpendapat bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah akan berdampak pada peningkatan belanja daerahnya.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Khusus didefinisikan sebagai jenis transfer dana perimbangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional harus dimuat dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun anggaran yang bersangkutan.

Penelitian dari (Khoiri, 2015) yang bertujuan untuk mengetahui apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah baik secara parsial dan simultan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode panel data atau *Pooled Least Square* (PLS), dengan jumlah sampel sebanyak 26 laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah dengan nilai probabilitas = $0,02 < 0.005$. Penelitian tersebut sesuai dengan pendapat dari (Fajar, 2016) dan (Kurniawan, *et al.*, 2019) yang juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Studi yang dilakukan (Nurdini, *et al.*, 2015), pada Kabupaten / Kota di Jawa Barat menyimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian dari (Mulyati, *et al.*, 2018) yang meneliti sejumlah 69 laporan keuangan pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang menyatakan secara parsial dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah. Demikian juga penelitian dari (Wulansari, 2015) yang menyimpulkan hal yang sama.

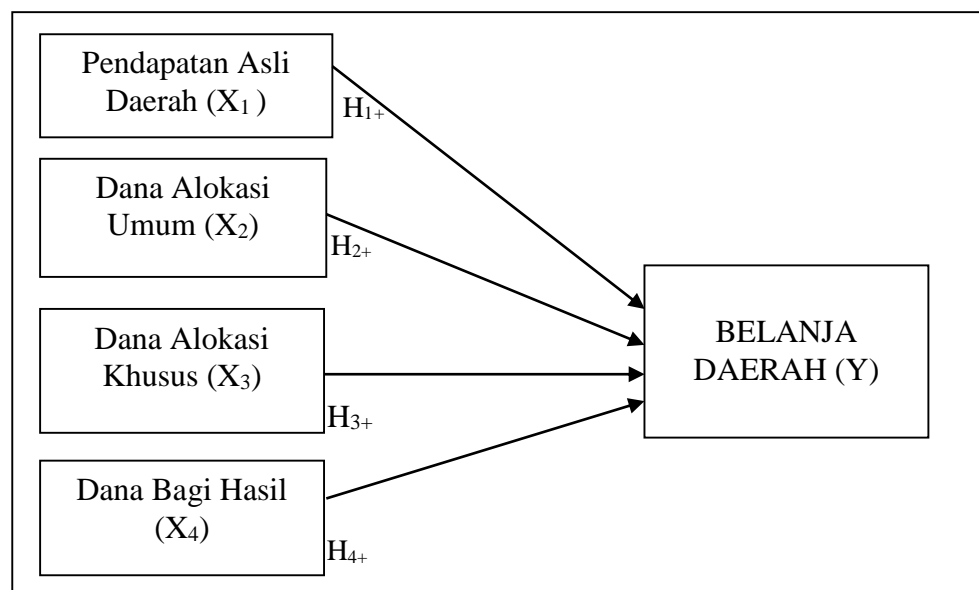
5. *Flypaper Effect*

Menurut (Astutik, 2016) menerangkan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara dana transfer dari pemerintah pusat terhadap belanja daerah, dimana secara lebih spesifik dapat diungkapkan bahwa kebijakan - kebijakan pemerintah daerah seringkali menyesuaikan dengan dana transfer yang mereka terima sehingga hal tersebut dapat menimbulkan respon yang tidak simetris. Hal tersebut diperkuat oleh (Azhar, 2018) yang melakukan penelitian mengenai *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah membuktikan bahwa baik standar koefisien maupun taraf signifikansi DAU lebih besar dari pada PAD yang mengindikasikan adanya *flypaper effect* pada belanja daerah Provinsi Jawa Tengah. Pembuktian yang sama dilakukan oleh

(Wulansari, 2015) yang menyatakan bahwa koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD sehingga telah terjadi adanya fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah pada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur periode 2012-2013.

Dari uraian tersebut diatas bahwa Pemerintah Daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sangat erat berkaitan dengan respon pemerintah daerah dalam hal pengelolaan untuk belanja daerahnya, apabila respon tersebut lebih banyak menggunakan dana alokasi umum dari pada menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri maka akan terjadi *flypaper effect*.

Model grafis yang menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini, 2020

D. Perumusan Hipotesis

Penelitian harus disusun dengan metode yang sistematis, menurut (Sugiyono, 2016), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusunnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, telaah pustaka dan tinjauan penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran tersebut diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini meliputi:

- H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah.
- H2 : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah.
- H3 : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah .
- H4 : Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif karena data yang digunakan adalah data angka atau numerik, penelitian ini mengungkap besar atau kecil suatu pengaruh hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka – angka dengan mengumpulkan data sebagai faktor pendukung terhadap pengaruh variabel yang bersangkutan untuk mencoba dianalisis. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dimana menurut (Sugiyono, 2016) Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Pada umumnya data sekunder ada dalam bentuk catatan, bukti atau laporan historis yang tersusun dalam bentuk arsip, data dokumen terbaik yang sudah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

1. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini mengambil data di Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah, dengan pengambilan data secara langsung di kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Taman Menteri Supeno Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Meliputi 29 Kabupaten dan 6 Kota yaitu :

- | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Kab. Cilacap | 13. Kab. Karanganyar | 25. Kab. Batang |
| 2. Kab. Banyumas | 14. Kab. Sragen | 26. Kab. Pekalongan |
| 3. Kab. Purbalingga | 15. Kab. Grobogan | 27. Kab. Batang |
| 4. Kab. Banjarnegara | 16. Kab. Blora | 28. Kab. Tegal |
| 5. Kab. Kebumen | 17. Kab. Rembang | 29. Kab. Brebes |
| 6. Kab. Purworejo | 18. Kab. Pati | 30. Kota Magelang |
| 7. Kab. Wonosobo | 19. Kab. Kudus | 31. Kota Surakarta |
| 8. Kab. Magelang | 20. Kab. Jepara | 32. Kota Salatiga |
| 9. Kab. Boyolali | 21. Kab. Demak | 33. Kota Semarang |
| 10. Kab. Klaten | 22. Kab. Semarang | 34. Kota Pekalongan |
| 11. Kab. Sukoharjo | 23. Kab. Temanggung | 35. Kota Tegal |
| 12. Kab. Wonogiri | 24. Kab. Kendal | |

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran APBD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan Populasi sejumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota, dengan penelitian selama 3 tahun (2016-2018).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016) sampel yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan seluruh populasi tersebut, bisa juga disebut sampel jenuh dengan metode sensus. Data yang di gunakan yaitu seluruh Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, pada 29 Kabupaten dan 6 Kota selama 3 tahun (2016 – 2018) yang melaporkan data mengenai PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Daerah yang diperoleh dari kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel yang diukur, indikator dan atribut yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut ini:

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa satu variabel terikat (*Dependent Variabel*) yaitu: Belanja Daerah dan empat variabel bebas (*Independent Variabel*) yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Indikator	Rumus	Skala
1.	Variabel Terikat (Dependent Variable) Belanja Daerah (Y)	1. Belanja operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja tidak terduga 4. Belanja transfer	Belanja Daerah = belanja operasi + belanja modal + belanja tidak terduga + belanja transfer	Rasio

2.	Variabel Bebas (Independent Variable) PAD (X_1)	1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 4. Lain – lain pendapatan asli yang sah	PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan + Lain - lain pendapatan asli yang sah.	Rasio
3.	DAU (X_2)	Pendanaan untuk pelaksanaan desentralisasi	DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar <i>Dimana :</i> Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal	Rasio
4.	DAK (X_3)	Kebutuhan khusus di wilayah / kabupaten masing masing, pemenuhan kebutuhan investasi sarana dan prasarana baru, bisa (Fisik dan non fisik)	DAK = Penerimaan umum APBD - Belanja Pegawai Daerah <i>Dimana :</i> Penerimaan umum = PAD + DAU + (DBH - DBHDR)	Rasio

5.	DBH P dan BP (X_4)	DBH pajak terdiri dari : PBB, BPHTB dan PPh, sedangkan untuk DBH BP (sumber daya alam) dari : Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertam- ba- ngan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan panas bumi.	DBH = DBH (pajak) + DBH (sda)	Rasio
----	------------------------	---	----------------------------------	-------

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari, mencatat, menganalisis dan menghitung secara langsung data – data yang diperlukan dan berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. (Sugiyono, 2016).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018 yang berisikan tentang Belanja Daerah, PAD, DAU, DAK, DBH P dan DBH BP.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari

hasil analisis menjadi data yang bisa disajikan untuk pengkajian lebih lanjut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan komputerisasi program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya, pengolahan data meliputi kegiatan: Editing, Coding, Pemberian skor atau nilai, dan Tabulasi. Interpretasi hasil SPSS dipengaruhi oleh besarnya ukuran sampel, dimana ukuran sampel memberikan dasar untuk mengestimasi sampling *Disturbance error*. (Ghozali, 2011).

F. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

Setelah data penelitian didapat, selanjutnya untuk lebih memahami batasan-batasan variabel yang akan dianalisis perlu diketahui tentang alat analisis data dan pengujian hipotesis diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis Statistik deskriptif adalah uji statistik yang digunakan untuk menganalisa data, menggambarkan dan mendeskripsikan variabel – variabel dalam penelitian ini, untuk dapat dilihat dan dihasilkan, sehingga dapat mempermudah pembaca secara kontekstual. Adapun menurut (Sugiyono, 2016) mengenai statistik deskriptif adalah: “ Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

2. Uji Asumsi Klasik :

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sebagai alat prediksi dapat memperoleh hasil yang baik. Dari uji asumsi klasik ini akan dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Tujuan Uji Normalitas Data adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika menyebar mengikuti garis diagonalnya maka normalitas terpenuhi.

Analisa statistik dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, dimana normalitas terpenuhi jika hasil uji menunjukkan tidak signifikan probabilitas $> \alpha = 0,05$. Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat juga dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan standard error skewness; sedang rasio

kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis. Sebagai pedoman, bila rasio kurtosis dan skewness berada di antara -2 hingga $+2$, maka distribusi data adalah normal. (Santoso, 2012).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya adalah konstan (*homoskedastisitas*). Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas*, dan bukan *heteroskedastisitas*.

Untuk mendeteksi *heteroskedastisitas* ada atau tidaknya pola yang terjadi pada nilai residu pada model, metode yang digunakan seperti metode Grafik Park Gleyser, pada penelitian ini dengan menggunakan metode Park Gleyser, gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel independen terhadap nilai absolut residunya (e), jika nilai probabilitasnya $>$ nilai alfabanya (0,05), maka dapat dipastikan model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas. (Gujarati, 2012).

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel independen, Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor), yaitu:

- Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.
- Jika nilai tolerance < 0.10 dan VIF > 10 , maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. (Santoso, 2012).

d. Uji Autokorelasi

Menurut (Santoso, 2012) “ Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya)”. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series, atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan, tahunan, dan seterusnya, karena itu ciri khusus uji ini adalah waktu. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut : Durbin-Watson (DW). Kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Jika D-W di antara -2 sampai + 2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika D-W diatas + 2 berarti ada autokorelasi negatif

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi

3. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dengan beberapa cara sebagai berikut :

a. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Penggunaanya yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan derajat kebebasan pada α 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya.

b. Uji t (Uji Parsial)

Menurut (Ghozali, 2011) Uji statistik ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05 ($\alpha = 5\%$).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan) ini berarti secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan) ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) merupakan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dan proporsi dari variabel terikat yang diterangkan oleh variasi dari variabel-variabel penjelasnya. Apabila dari hasil perhitungan nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa kontribusi dari variabel bebas terhadap variasi variabel terikat semakin besar, berarti model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variabel terikatnya. Sebaliknya apabila nilai *Adjusted R Square* menunjukkan semakin kecil, berarti berarti model yang digunakan semakin lemah dalam menjelaskan variasi variabel terikat.

Formulasi yang digunakan untuk analisis adalah sebagai berikut :

(Sugiyono, 2016)
$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi

Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) berada pada kisaran angka 0 dan 1 atau $0 \leq \text{Adjusted R Square} \leq 1$.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini untuk meneliti pengaruh dari beberapa variabel independen (variabel bebas) X terhadap variabel dependen Y. Adapun Persamaan regresi linier berganda mengacu kepada (Sugiyono, 2016) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot X_4 + e_1 \quad \text{Dimana} =$$

Y = Variabel Belanja Daerah (variabel dependen)

a = Konstanta

β = Koefisien regresi dari masing-masing variabel.

(β_1 , β_2 , β_3 , dan β_4)

X_1 = Variabel bebas Pendapatan asli daerah (PAD)

X_2 = Variabel bebas Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Variabel bebas Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_4 = Variabel bebas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

e = *Standar error estimasi*

5. Analisis Flypaper Effect

Analisis *flypaper effect* digunakan untuk menganalisa apakah terjadi *Flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di Propinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila efek (nilai koefisien regresi) DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada efek (nilai koefisien regresi) PAD dan keduanya sama-sama signifikan.
- b. Apabila PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, maka dapat disimpulkan telah terjadi *flypaper effect* (Wulansari, 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Propinsi Jawa Tengah

Ada tiga puluh empat Provinsi di Indonesia, Jawa Tengah adalah salah satunya berada ditengah Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara $5^{\circ} 40'$ dan $8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 30'$ dan $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur, di apit oleh Propinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah tercatat 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia, beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Kondisi topografi Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan, dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah, dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah, adanya pantai Utara dan Selatan. Pembagian wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota dimana terdapat 573 kecamatan, 769 kelurahan dan 7.809 desa dan ibukota terletak di Kota Semarang, untuk Kabupaten terluas yakni Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah 213.851 hektar atau 6,57 persen dari luas Jawa Tengah, kota terluas yaitu Kota Semarang dengan luas 37.367 hektar atau sekitar 1,15 persen dari luas Jawa Tengah dan kota tersempit di Provinsi Jawa Tengah yakni Kota Magelang dengan luas 1812 hektar atau 0,06

persen dari luas Jawa Tengah. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Dalam rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil pada kisaran 5,2% - 5,4%, bahkan selalu lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 5,32% meningkat dari pada tahun 2017 (5,26%), lebih baik dibandingkan nasional (5,17%). Peningkatan Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2014-2018 didukung dengan

pertumbuhan yang positif seluruh lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah informasi dan komunikasi, diikuti jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

2. Gambaran Umum BPKAD Propinsi Jawa Tengah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Taman Menteri Supeno Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telepon , Kota Semarang, Jawa Tengah Telp : 024 -831117. Untuk kedudukan, tugas dan fungsi antara lain :

a. Kedudukan

1. Badan merupakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

c. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah.
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. (Jateng B. P., 2018).

B. Hasil Penelitian

1. Analisa Deskripsi Data Penelitian

Dalam mendeskripsikan data penelitian digunakan analisa deskripsi yang merupakan hasil pengolahan data sekunder dari variabel penelitian. Proses analisa menggunakan Program SPSS dan output yang dihasilkan berupa nilai mean, median, maximum dan minimum serta sum. Hasil deskriptif analisis dari masing-masing variabel dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Hasil deskripsi analisis dari variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Bagi hasil (DBH) dengan variabel terikat Belanja Daerah (BD) dapat dilihat pada nilai mean, sum, skor maximum serta standar deviasi, hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Hasil Deskriptif Statistik Variabel

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
PAD	105	171.277.522.706	1.821.274.103.250	367.842.039.799.22	251.225.824.048.481
DAU	105	440.041.244.000	1.398.539.653.000	961.597.196.513.12	245.116.718.554.080
DAK	105	42.066.300.000	483.813.446.054	270.255.149.181.03	109.995.314.408.587
DBH	105	24.417.997.942	246.044.588.085	51.613.644.313.61	42.801.580.899.061
B D	105	849.474.262.275	4.505.423.372.044	1.849.057.015.26	620.716.180.458,743
Valid N	105				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Dalam tabel 4.1. diatas hasil statistik menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan sejumlah 105 kabupaten/kota. Nilai minimum

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 171.277.522.706,- adalah Kota Blora dan nilai maksimum sebesar Rp. 1.821.274.103.250,- adalah Kota Semarang. Nilai mean (rata-rata) PAD dari 105 Kabupaten/Kota sebesar Rp. 367.842.039.799,22 Dengan standar deviasi sebesar Rp. 251.225.824.048.481. Dengan hasil nilai mean PAD lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi hal ini mengidentifikasi hasil sebaran datanya cukup baik, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias.

Nilai minimum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 440.041.244.000,- adalah Kota Magelang. Nilai maksimum sebesar Rp. 1.398.539.653.000,- adalah Kabupaten Banyumas. Nilai mean (rata-rata) DAU dari 105 Kabupaten/Kota sebesar Rp. 961.597.196.513.12 Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar Rp. 245.116.718.554.080,-. Dari hasil tersebut penunjukkan bahwa nilai mean DAU lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi hal ini mengidentifikasi hasil sebaran datanya juga sangat baik, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 42.066.300.000,- adalah Kabupaten Pati. Nilai maksimum sebesar Rp. 483.813.446.054,- adalah Kabupaten Cilacap. Nilai mean (rata-rata) DAK dari 105 Kabupaten / Kota sebesar Rp. 270.255.149.181.03. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar Rp. 109.995.314.408.587,-. Bahwa hasil dari nilai mean DAK lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi

hal ini mengidentifikasi hasil sebaran datanya juga cukup baik, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 24.417.997.942,- adalah Kota Salatiga. Nilai maksimum sebesar Rp. 246.044.588.085,- adalah Kabupaten Kudus. Nilai mean (rata-rata) DBHP/BP dari 105 Kabupaten/kota sebesar Rp. 51.613.644.313.61. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar Rp. 42.801.580.899.061,-. Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai mean DBH lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi hal ini mengidentifikasi hasil sebaran datanya juga baik, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp. 849.474.262.275 adalah Kota Salatiga. Nilai maksimum sebesar Rp. 4.505.423.372.044 adalah Kota Semarang. Nilai mean (rata-rata) Belanja Daerah dari 105 Kabupaten/kota sebesar Rp. 1.849.057.015.26 Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar Rp. 620.716.180.458,743. Dari hasil ini nilai mean Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini mengidentifikasi hasil sebaran datanya juga baik, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

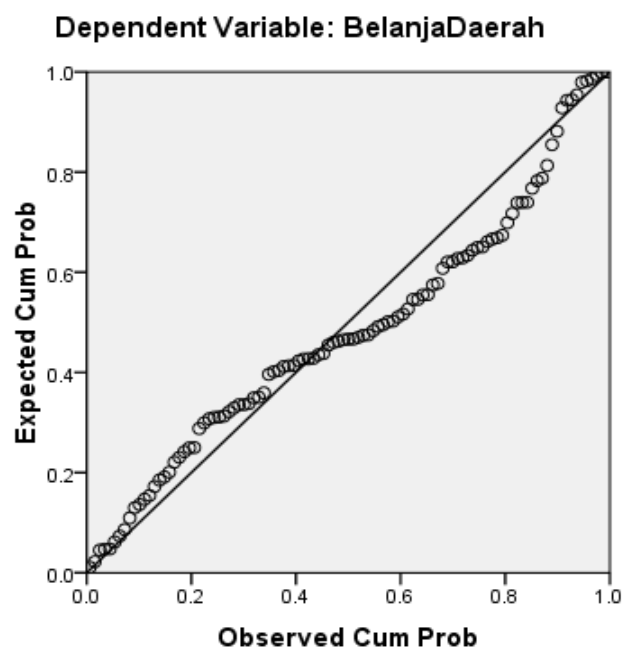
2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data dari hasil perhitungan selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kualitas data dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta pengaruh yang saling mempengaruhi antar

variabel penelitian yang merupakan prasyarat dari metode analisis regresi, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Menurut (Santoso, 2012), dasar pengambilan uji normalitas bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu apabila probabilitas $> 0,05$ maka distribusi adalah normal, dan bila probabilitas $< 0,05$ maka distribusi tidak normal. Uji Normalitas dengan menggunakan grafik P-Plot menunjukkan titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya (seperti terlihat pada gambar / diagram Normal P-Plot dibawah ini) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.2.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Untuk lebih mendukung atau membuktikan uji normalitas maka selanjutnya menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai Asymp. Sig. Berdasarkan data pada lampiran, hasil pengujian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov-Test

		Unstandarized Residual
N		105
Normal Parameters	Mean	0,0000775
	Std Deviation	173656459633.00366000
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.077
Kolomogorov Smirnov Z		1.260
Asymp.Sig		.084

a. Test distribution is Normal

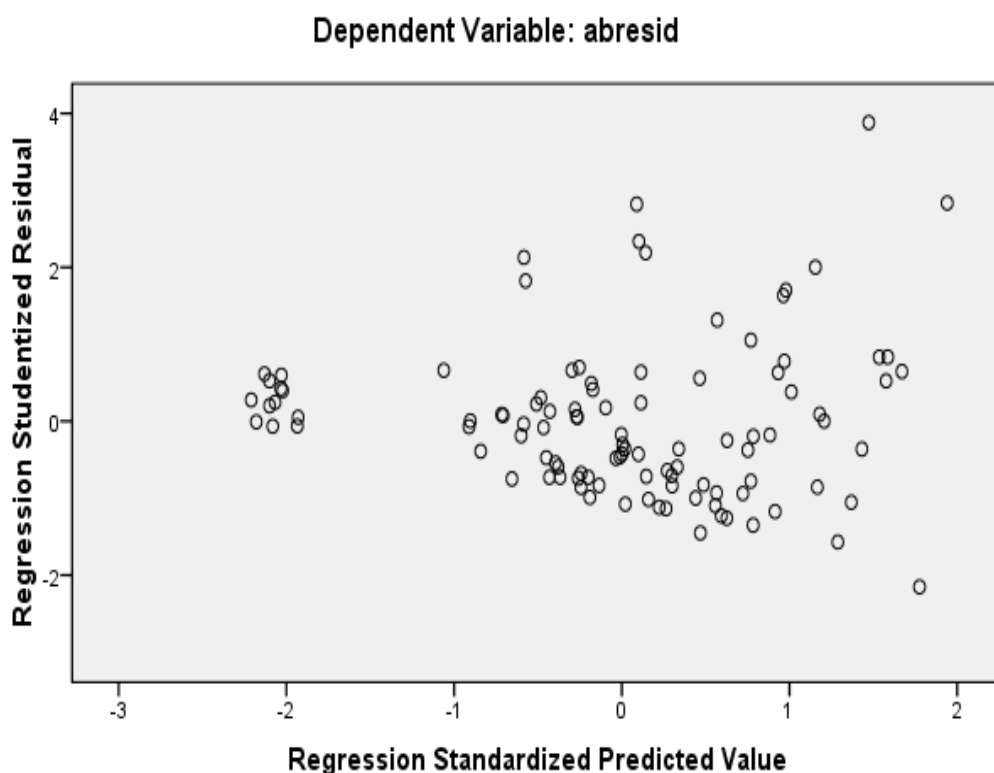
Sumber : Data Sekunder yang diolah , 2020

Dari hasil data tabel 4.2 diatas diketahui bahwa dari hasil uji perhitungan uji normalitas diperoleh nilai signifikansi yaitu $0,084 > \alpha = 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi secara normal dan dapat di analisa lebih lanjut.

b. Heteroskedastisitas

Menurut (Gujarati, 2012), dalam uji *heteroskedastisitas* dilakukan untuk menguji apakah didalam model penelitian ini terdapat ketidaksamaan variance dari satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, dasar pengambilan uji *heteroskedastisitas* bisa dilakukan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat dipastikan model tidak mengandung unsur uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan

grafik Scatterplot terlihat bahwa tidak ada pola tertentu karena titik-titik menyebar secara tidak beraturan baik diatas maupun di bawah sumbu 0 pada sumbu Y (seperti terlihat pada diagram Scatterplot dibawah ini) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas.



Gambar 4.3.
Scatterplot

Untuk lebih mendukung atau membuktikan uji Heteroskedastisitas maka selanjutnya analisis Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser* dengan tingkat sig $\alpha = 0,05$ hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	T hitung	A	Sig	Keterangan
PAD	-1,635	0,05	0,105	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
DAU	2,101	0,05	0,081	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
DAK	0,438	0,05	0,662	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
DBH	2,058	0,05	0,421	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan data tabel 4.3 diatas diketahui bahwa hasil perhitungan uji *Heteroskedastisitas* diperoleh untuk variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 terhadap Y nilai sig dari masing-masing variabel PAD = 0,105; DAU = 0,081; DAK = 0,662; dan DBH = 0,421, semuanya lebih besar > dari $\alpha = 0,05$. Oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat gejala *Heteroskedastisitas*.

c. Uji Multikolineritas

Menurut (Santoso, 2012), dasar pengambilan analisis *multikolineritas* dilakukan dengan mendeteksi nilai tolerance dan nilai *Varian Inflation Faktor* (VIF). Apabila nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi gejala *multikolineritas*, sedangkan bila nilai tolerance < 0.10 dan VIF > 10 maka terjadi gejala *multikolineritas*. Untuk hasil pengujian penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Hasil Uji Multikolineritas

Model	Tolerance	VIF
PAD	0,610	1,639
DAU	0,401	2,492
DAK	0,469	2,134
DBH	0,763	1,310

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa dari hasil perhitungan uji *Multikolineritas* diperoleh dari seluruh variabel independen (X_1 , X_2 dan X_3 , X_4) mempunyai nilai $VIF < 10$ serta nilai *tolerance* $> 0,1$, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat gejala *Multikolineritas*.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang diurutkan menurut waktu atau ruang (Santoso, 2012). Persamaan regresi yang baik tidak terdapat autokorelasi, untuk menguji terjadi autokorelasi atau tidak dalam hal ini menggunakan statistik uji Durbin Watson (DW) dengan batasan dan kriteria terjadinya autokorelasi menurut (Santoso, 2012) hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai DW lebih kecil dari (-2) berarti ada autokorelasi positif
2. Nilai DW diantara (-2) sampai (+2) berarti tidak ada autokorelasi

3. Nilai DW lebih besar dari (+2) berarti ada autokorelasi negatif

Untuk uji utokorelasi dapat di lihat di tabel dibawah ini.

Tabel 4.5.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.960 ^a	.922	.919	1.822

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.5 diatas didapat nilai statistik *Durbin-Watson* (DW) = 1.822 berada di antara (-2) sampai dengan (+2) maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak ada gejala autokorelasi.

3. Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan untuk melihat kebaikan model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji F, Uji t dan koefisien determinasi. Seperti dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6.
Adjusted R Square dan F Hitung

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics				
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.960 ^a	.922	.919	.922	294.407	4	100	.000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

a. Uji - F

Menurut (Ghozali, 2011), Uji – F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi linear berganda serta melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Ketentuannya apabila $\text{sig} \leq \alpha = 0,05$ atau $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka ada pengaruh secara simultan (bersama-sama) sehingga model regresi yang digunakan dikatakan baik (Fit). Pada tabel tersebut diatas menunjukkan hasil uji F dengan signifikansi = 0,000 lebih kecil $< \alpha = 0,05$ serta nilai $F \text{ hitung} = 294.407 > \text{nilai } F \text{ tabel}$ dengan *degree of freedom* = (k; n-k), $df = (4, 105-4) = 2,46$. Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Daerah, sehingga model regresi yang digunakan bisa dikatakan baik.

b. Uji - t

Untuk pembuktian terhadap hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat dari hasil uji – t, yang menurut (Ghozali, 2011), uji ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri. Ketentuannya apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $\text{sig.} \leq \alpha = 0,05$ maka ada pengaruh secara parsial sehingga hipotesis diterima.

Tabel 4.7.
Hasil Uji Hipotesis (Uji – t)

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Beta		
1	(Constant)	-84703152285.278		-1.170	.245
	PAD	1.346	.545	15.211	.000
	DAU	1.234	.487	11.031	.000
	DAK	.544	.096	2.357	.020
	DBH	2.041	.141	4.395	.000

a. Dependent Variable : Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji – t pada tabel 4.7 diatas, maka dapat dilakukan pembuktian dengan *degree of freedom* $n-4$ $((105-1) = 101)$ sebagai berikut:

1. Dari hasil uji – t, bahwa Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan tingkat sig. $\alpha = 0,05$ didapat nilai t hitung sebesar $15.211 > t$ tabel 1,660 dengan sig. 0,000 lebih kecil ($<$) $\alpha = 0,05$. Ini menunjukkan menolak H_0 atau menerima hipotesis yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah.
2. Dari hasil uji – t, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada tingkat sig. $\alpha = 0,05$ didapat nilai t hitung sebesar $11.031 > t$ tabel = 1,660 dengan sig. 0,000 lebih kecil ($<$) $\alpha = 0,05$. Ini menunjukkan menolak H_0 atau menerima hipotesis yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah.

3. Hasil uji – t, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada tingkat sig. $\alpha = 0,05$ didapat nilai t hitung sebesar $2.357 > t \text{ tabel} = 1,660$ dengan sig. 0,020 lebih kecil ($<$) $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa menolak H_0 atau menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
4. Hasil uji - t, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah dengan tingkat sig. $\alpha = 0,05$ didapat nilai t hitung sebesar $4.395 > t \text{ tabel} = 1,660$ dengan sig. 0,000 lebih kecil ($<$) $\alpha = 0,05$. Ini menunjukkan menolak H_0 atau menerima hipotesis yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah.

c. Koefisien Determinasi

Dalam Koefisien Determinasi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen. Hasil dari Koefisien Determinasi dapat dilihat pada *Adjusted R Square*.

Tabel 4.8.
Adjusted R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics				
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.960 ^a	.922	.919	.922	294.407	4	100	.000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Dari tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,919. Dapat diartikan bahwa kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dalam mempengaruhi variabel Belanja Daerah sebesar 91,9% ($0,919 \times 100\%$), sementara yang 8,1 % ($100\% - 91,9\%$), dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu dana transfer pemerintah pusat lainnya, dana pemerintah daerah lainnya dan lain – lain pendapatan yang sah Provinsi Jawa Tengah.

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Beta		
1	(Constant)	-84703152285.278		-1.170	.245
	PAD	1.346	.545	15.211	.000
	DAU	1.234	.487	11.031	.000
	DAK	.544	.096	2.357	.020
	DBH	2.041	.141	4.395	.000

a. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan dari hasil analisis regresi pada tabel 4.9 diatas maka dibuat persamaan linear *Untandarized coefficients beta* Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD) sebagai berikut:

$$Y = -84703152285.278 + 1.346.PAD + 1.234.DAU + 0,544.DAK + 2.041.DBH + e$$

Persamaan linear tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Koefisien konstanta (α) sebesar -84703152285.278, artinya jika variabel independen (PAD, DAU, DAK, dan DBH) bernilai konstan (0), maka nilai Belanja Daerah adalah sebesar Rp. -84703152285.278
- b. Nilai Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 1,346, bernilai positif yang artinya bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 1 (satu) % maka Belanja Daerah (BD) akan meningkat sebesar 1,346 %.
- c. Nilai Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) = 1,234, bernilai positif yang artinya bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat 1 (satu) % maka Belanja Daerah (BD) akan meningkat sebesar 1,234 %.
- d. Nilai Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) = 0,544 bernilai positif yang artinya bahwa apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat sebesar 1 (satu) % maka Belanja Daerah (BD) akan semakin meningkat sebesar 0,544 %.

- e. Nilai Koefisien Regresi Dana Bagi Hasil (DBH) = 2,041, bernilai positif yang artinya bahwa apabila Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat sebesar 1 (satu) % maka Belanja Daerah (BD) akan semakin meningkat sebesar 2,041 %.

5. Analisis *Flypaper Effect*

Pengujian terhadap ada atau tidaknya fenomena *Flypaper Effect* dengan cara membandingkan antara nilai koefisien PAD dengan Nilai koefisien DAU, yang lebih berpengaruh terhadap belanja daerah maka hasil yang menunjukkan yaitu :

Apabila nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada nilai koefisien PAD dan kedua – duanya berpengaruh maka bisa disimpulkan telah terjadi *flypaper effect* dan apabila PAD tidak berpengaruh maka dapat disimpulkan telah terjadi *flypaper effect* (Wulansari, 2015). Hasil analisis untuk menghitung *flypaper Effect* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10.
Hasil uji Regresi Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-31046224656.837	77858517713.815		-.399	.691
PAD	1.467	.083	.594	17.747	.000
DAU	1.394	.085	.550	16.452	.000

a. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Dari tabel 4.10 diatas, maka persamaan regresinya adalah :

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + e$$

$$BD = -31046224656.837 + 1,467PAD + 1,394DAU + e$$

Hasil uji nilai *koefisien standar beta* pada tabel menunjukkan bahwa nilai koefisien standar beta Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,594 lebih besar dari nilai *koefisien standar beta* Dana Alokasi Umum sebesar 0,550. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 -2018.

Untuk nilai t hitung dari PAD sebesar 17.747 juga lebih besar dari nilai t hitung DAU sebesar 16.452 yang berarti PAD mempunyai pengaruh yang lebih terhadap belanja daerah dibandingkan dengan DAU. Dengan demikian dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fenomena *flypapper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Provisi Jawa Tengah periode tahun 2016-2018.

C. Pembahasan

Tujuan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper effect* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018. Berdasarkan dari hasil analisa menggunakan regresi linear berganda maka dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (X₁) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi 1,346 dengan nilai positif, yang artinya ketika variabel Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 % maka variabel Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1,346 begitu juga sebaliknya. Adapun nilai t hitung = 15.211 > dari t tabel = 1,660 dengan nilai sig. dari variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah yaitu $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karenanya hipotesis 1 yang menyatakan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah dapat diterima.

Hal ini sangat wajar karena PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dengan meningkatnya pendapatan daerah menunjukkan perkembangan yang positif dalam tingkat kemandirian keuangan daerah untuk kedepannya. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan daerah cenderung akan semakin besar pula pengeluaran untuk belanja daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah terutama Provinsi Jawa Tengah dalam kebijakan otonominya secara maksimal dan sesuai dengan kemampuan untuk lebih giat dalam menggali potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber keuangan dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya, tanpa harus tergantung dan menunggu bantuan dana transfer dari pusat. (Rinaldi, 2012)

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Wulansari, 2015), (Khoiri, 2015) dan (Asari, *et al.*, 2018) yang menyatakan dalam

penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

2. Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisien regresi 1,234 dengan nilai positif, yang artinya ketika variabel Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 % maka variabel Belanja Daerah akan meningkat pula sebesar 1,234 begitu juga sebaliknya. Adapun nilai t hitung = 11,031 > dari t tabel = 1,660 sedangkan nilai sig. dari pengaruh variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah dapat diterima.

Ini menunjukkan bahwa masih tingginya Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum yang merupakan dana transfer dari pusat yang di peroleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia merupakan yang paling banyak dan bahkan besarnya hampir sama dari pendapatan asli daerah jadi sangatlah wajar apabila Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap belanja daerah, dalam mendorong pelaksanaan otonomi daerah efek Dana Alokasi Umum sangat berperan penting dalam membantu pendapatan yang optimal suatu daerah terutama daerah - daerah yang pendapatan asli relatif kecil, yang akan berdampak semakin besar Dana Alokasi Umum

yang diterima maka akan semakin besar pula untuk pengeluaran belanja daerahnya. (UU No. 33 Tahun 2004)

Hasil penelitian ini didukung oleh (Kurniawan, *et al.*, 2019), (Mulyati, *et al.*, 2018) dan (Kurniawan W. A., 2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi umum mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (X₃) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai koefisien regresi 0,544 dengan nilai positif, yang artinya ketika variabel Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1% maka variabel Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,544 begitu juga sebaliknya. Adapun nilai t hitung = 2,357 > dari t tabel = 1,660 dengan nilai sig. dari variabel Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah yaitu $0,020 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah dapat diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus di pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2016-2018 sangat berpengaruh terhadap belanja daerah seperti dana transfer lainnya yang memiliki peranan dalam alokasi belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang di tanggung oleh pemerintah daerah dengan pemanfaatan untuk

meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan sarana prasarana yang di realisasikan dalam belanja daerah. (Khoiri, 2015)

Oleh karena itu penelitian ini mendukung dari penelitian sebelumnya dari (Kurniawan, *et al.*, 2019) dan (Fajar, 2016) yang menunjukkan hasil serupa yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan belanja modal.

4. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (X4) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Dana Bagi Hasil nilai koefisien regresi 2,041 dengan nilai positif, yang artinya ketika variabel Dana Bagi Hasil meningkat sebesar satu persen maka variabel Belanja Daerah akan meningkat sebesar 2,041 begitu juga sebaliknya. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung = 4,395 > dari t tabel = 1,660 dengan nilai sig. sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hasil dari hipotesis 4 yang menyatakan variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dapat diterima.

Menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil ikut meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan anggaran belanja daerah. Provinsi yang menerima Dana Bagi hasil besar maka cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial yang diperoleh dari transfer pusat yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, penerimaan tersebut menggunakan prosentase

tertentu berdasarkan atas daerah penghasil, digunakan daerah untuk membiayai pembangunan, fasilitasi infrastruktur dan belanja daerah di samping dana PAD, DAU, DAK sehingga wajar jika dana bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah. (UU No. 33, 2004)

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari (Mulyati, *et al.*, 2018), (Wulansari, 2015) dan (Nurdini, *et al.*, 2015) yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah secara simultan, sedangkan secara parsial dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah.

5. Analisis *Flypaper Effect*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien standar beta Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,594 lebih besar dari nilai koefisien standar beta Dana Alokasi Umum sebesar 0,550. Sedangkan nilai *t* hitung dari PAD sebesar 17.747 juga lebih besar dari nilai *t* hitung DAU sebesar 16.452 yang berarti PAD mempunyai pengaruh yang lebih terhadap belanja daerah dibandingkan dengan DAU. Dengan demikian dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fenomena *flypapper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2018.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak terlalu memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, dimana mereka juga mampu

menggali potensi yang dimiliki daerahnya untuk dapat lebih menopang anggaran belanja daerahnya secara lebih optimal. (Tambunan, 2015).

Hasil Penelitian ini sependapat dengan penelitian dari (Khoiri, 2015), (Dayanti, *et al.*, 2018) dan (Kolinug, *et al.*, 2015), dimana penelitiannya untuk mengetahui apakah telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* tidak terjadi, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dana alokasi umum terhadap besaran belanja daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Belanja Daerah serta analisis *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2018, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah, hal ini dibuktikan dengan pengujian nilai $t_{hitung} = 15,211 > \text{dari } t_{tabel} = 1,660$ dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 11,031 > \text{dari } t_{tabel} = 1,660$ sedangkan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 2,357 > \text{dari } t_{tabel} = 1,660$ dengan nilai signifikansi $0,020 < \alpha = 0,05$.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 4,395 > \text{dari } t_{tabel} = 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$.
5. Untuk analisis fenomena *flypaper effect* tidak terjadi pada Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018, hal ini dibuktikan dengan hasil

nilai koefisien standar beta Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,594 lebih besar dari nilai *koefisien standar beta* Dana Alokasi Umum sebesar 0,550. Sedang nilai *t* hitung dari PAD sebesar 17.747 juga lebih besar dari nilai *t* hitung DAU sebesar 16.452.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut diatas maka saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian berkaitan dengan variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil masih berpengaruh positif terhadap belanja daerah hal ini membuktikan bahwa tingkat ketergantungan akan dana transfer yang bersumber dari APBN masih cukup tinggi sehingga sebaiknya pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah lebih memacu untuk menggali lagi potensi asli daerahnya baik secara lebih intensif maupun secara ekstensif dengan lebih mengeksplor lagi peluang-peluang potensi pendapatan asli daerah yang belum dimanfaatkan ataupun masih belum optimal pemanfaatannya terutama dalam hal pajak yang banyak belum terserap. Hal tersebut diharapkan agar mampu lebih meningkatkan lagi kemandirian daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat lebih memanfaatkan dana pendapatan asli daerah maupun dana transfer pemerintah pusat secara lebih efisien dan efektif untuk membangun

infrastruktur publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah, misalnya dengan membuat akses jalan ke tempat sumber produksi di daerah, ataupun akses ke tempat potensi wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan porsi pendapatan asli daerah dibandingkan dana transfer.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya jumlah sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, misalnya dengan memperpanjang periode penelitian selama beberapa tahun, ataupun dapat mengikuti propinsi lainnya tidak terbatas hanya di Provinsi di Jawa Tengah saja, sehingga akan lebih meningkat lagi tingkat generalisasinya dan juga bisa di perbanyak lagi untuk variabel penelitian semisal Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Dana Pemerintah Daerah Lainnya dan Lain – Lain Pendapatan yang sah dari Pemerintah Provinsi.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk saat ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, di antaranya sebagai berikut :

1. Karena keterbatasan kemampuan, waktu, tenaga dan biaya maka penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH Pajak, Bukan Pajak dan Belanja Daerah serta *flypaper effect*.
2. Populasi pada penelitian ini hanya mengambil di lingkup Provinsi Jawa Tengah.
3. Penelitian ini hanya mengambil sampel penelitian 3 tahun laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. (2014). *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* , Vol. 3 No. 2 , 1232-1261.
- Arfianti, D., & Kawedar, W. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Universitas Diponegoro Semarang*, 1-31.
- Asari, N. M., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 25 No. 2 , 877-904.
- Astutik, E. N. (2016). Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2008 - 2014. *Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, 1-99.
- Atika, R. L. (2015). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. *Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah*, 4 No. 9 .
- Azhar, M. R. (2018). *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah . *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta*.
- Cahyani, M. G. (2018). Analisis Fenomena *Flypaper Effect* Pada Provinsi Khusus Di Indonesia Tahun 2005-2016. *Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1-52.
- Dayanti, E. R., Delis, A., & Emilia. (2018). *Flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7 No. 3 .
- Fajar, P. M. (2016). Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal kuntansi Universitas Udayana*, 15 No. 2.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar Dasar Ekonometrika* (Edisi ke 5 ed.). (M. R.C., Penerj.) Salemba Empat.
- Halim, A., & Ibnu, M. (2009). *Problem desentralisasi dan perimbangan keuangan pemerintahan pusat-daerah: peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya daerah*. Sleman Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Idris, I. F. (2016). *Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin*. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, Vol. 4 No. 1 , 28-42.
- Indonesia, D. D. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*.
- Indonesia, R. (2004). *Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Indonesia, R. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia, R. (2009). *Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Jateng, B. P. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018* (Vol. 322). Semarang: Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- Jateng, B. P. (2018, November 22). *Kedudukan, Tugas dan Fungsi*. BPKAD Provinsi Jateng: <http://bpkad.jatengprov.go.id>.
- Khoiri, R. H. (2015, Oktober). *Flypaper Effect Dan Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Barat*. *Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 2 , 211-230.
- Kolinug, F. C., G. Kumenaung, A., & Ch.Rotinsulu, D. (2015). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 17 No. 2.

- Kurniawan, R., Ratnanto, S., Widodo, D. W., & Santosa, T. D. (2019). Analisis *Flypaper Effect* Dana Transfer Dan PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Vol. 6*, 22-32.
- Kurniawan, W. A. (2016). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung). 1-13.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (IV ed.). Yogyakarta: CV. Andi Offset Yogyakarta.
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2018). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 2 No. 1*, 55-66.
- Nasution, A. A. (2015). The Effect Of Fiscal Potential And Needs On Regional Bottom Aid Model (BDB) In North Sumatera Province. *European Journal of Accounting And Fianance Research, 3 No. 2*, 70-86.
- Nurdini, R., Wiratno, A., & Farida, Y. N. (2015, Maret). Analisis FlyPaper Effect Pada Dana Alokasi Umu (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (BDH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) di Kabupaten / Kota di Jawa Barat . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA), Vol. 2 No. 1* , 80-94.
- Panji, I. P., & Indrajaya, I. B. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, 5 No. 3*.
- Rahmawati, N. I. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. (*Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*).
- Rinaldi, U. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan. *Jurnal Eksos, Vol. 8 No. 2* , 105-113.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Simanjuntak, Lestari, Subekhi, A., Ferina, I. S., & Yusrianty, H. (2013). Analysis Of Flypaper Effect In General Allocation Fund And Regional Income To Regional Expenditure of Districts And Cities In South Sumatera. *Four A Annual Conference*.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (XXIII ed.). CV. Alfabet Bandung.
- Tambunan, T. T. (2015). *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, S. E., & Supheni, I. (2017). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. *Jurnal USTJOGJA .AC. ID Dewantara*, 1 No. 2.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 1 (1), 63-76.
- Wulansari, D. T. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat) Dalam Periode tahun 2012-2013. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta*.
- www.solopos.com. (2016, Juni 20). Pendapatan Daerah : Jateng Turunkan Target PAD, Kalangan DPRD Curiga Mark Down. 1. (R. Wibisono, Penyunt.) Semarang, Jawa Tengah.
- Yani, A. (2008). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabulasi Data

Tabel: Dana PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2018.

No	Kabupaten / Kota	Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH	Belanja Daerah
1	Kab. Cilacap	2016	428,598,349,897	1,384,695,514,000	483,813,446,054	72,636,973,831	3,150,325,840,872
		2017	648,091,381,095	1,360,370,867,000	440,533,135,033	74,049,081,049	3,014,110,475,842
		2018	527,577,740,281	1,362,443,518,000	443,618,853,481	68,197,974,851	2,985,422,839,102
2	Kab. Banyumas	2016	541,418,386,912	1,398,539,653,000	412,853,809,576	57,703,885,214	2,415,866,207,746
		2017	619,701,627,380	1,373,971,809,000	449,360,479,699	45,035,106,732	2,594,781,048,739
		2018	648,326,914,034	1,373,971,809,000	477,533,051,326	42,908,155,816	2,741,141,898,312
3	Kab. Purbalingga	2016	251,816,668,602	897,337,823,000	243,675,826,820	36,099,689,040	1,555,984,728,968
		2017	355,859,003,583	881,574,483,000	329,597,927,647	31,434,685,066	1,708,374,442,209
		2018	282,679,019,517	881,574,483,000	333,565,496,887	25,434,251,988	1,596,511,126,300
4	Kab. Banjarnegara	2016	221,048,387,512	976,642,965,000	252,046,683,715	35,379,420,897	2,017,382,964,152
		2017	297,485,382,003	959,486,489,000	423,935,262,343	37,702,694,444	2,178,823,342,905
		2018	235,994,436,137	959,486,489,000	364,545,234,875	30,048,650,863	2,119,096,683,202
5	Kab. Kebumen	2016	291,016,321,703	1,256,068,249,000	480,415,539,065	43,287,944,721	2,283,531,796,631
		2017	443,608,862,461	1,234,003,169,000	438,407,835,223	40,008,376,950	2,113,132,464,285
		2018	352,047,092,281	1,234,003,169,000	390,504,708,527	29,627,426,379	2,145,847,613,126
6	Kab. Purworejo	2016	255,599,240,424	940,778,244,000	339,417,614,546	35,510,298,310	1,594,894,227,866
		2017	298,606,494,653	924,251,795,000	250,875,295,253	32,133,216,461	1,773,135,401,455
		2018	286,971,590,024	924,251,795,000	297,357,422,378	25,827,467,718	1,680,531,555,419
7	Kab. Wonosobo	2016	199,894,767,510	841,407,175,000	198,974,002,000	38,789,323,015	1,375,461,687,110
		2017	228,017,473,938	826,626,357,000	267,466,630,022	39,124,031,624	1,427,840,983,198
		2018	226,819,478,601	827,791,657,000	277,386,975,847	34,626,572,812	1,576,536,848,054
8	Kab. Magelang	2016	288,485,678,128	1,078,981,977,000	83,510,170,410	50,834,584,009	1,708,801,717,141
		2017	403,561,238,310	1,060,027,733,000	56,452,309,000	45,499,673,539	1,957,966,285,066
		2018	325,089,093,092	1,060,540,612,000	301,160,637,595	36,431,591,975	1,957,114,127,802
9	Kab. Boyolali	2016	292,310,032,226	1,032,744,101,000	279,575,054,900	46,125,444,420	1,730,044,307,198
		2017	388,014,897,386	1,014,602,019,000	294,632,409,920	45,204,051,948	1,787,133,997,452
		2018	342,957,213,726	1,014,602,019,000	381,026,305,696	42,900,294,604	1,859,493,312,917

10	Kab. Klaten	2016	224,197,408,481	1,204,344,586,098	318,994,589,110	50,275,933,273	1,784,595,702,994
		2017	371,718,439,306	1,271,590,067,902	302,273,202,240	50,852,354,977	1,846,458,264,255
		2018	395,884,244,135	1,237,967,327,000	373,028,991,537	41,131,449,124	1,906,017,589,489
11	Kab. Sukoharjo	2016	363,163,428,162	922,624,169,000	287,044,558,458	37,286,042,435	1,650,404,440,343
		2017	464,567,409,857	906,416,629,000	278,332,947,422	33,128,117,129	1,581,523,010,006
		2018	433,485,481,219	906,416,629,000	286,887,271,862	26,507,198,592	1,740,840,296,519
12	Kab. Wonogiri	2016	218,604,854,595	1,145,434,277,000	289,121,067,975	35,612,991,283	2,132,909,652,036
		2017	333,840,434,904	1,125,312,680,000	360,636,385,112	34,156,557,776	1,972,104,990,826
		2018	269,032,427,619	1,124,733,467,000	379,596,211,850	27,810,006,625	1,914,884,382,844
13	Kab. Karanganyar	2016	301,307,000,956	996,164,049,000	352,752,915,080	41,236,369,287	1,818,357,207,631
		2017	415,142,563,370	978,664,650,000	253,371,946,521	39,433,492,326	1,732,306,772,949
		2018	343,156,469,167	978,664,650,000	308,185,919,715	38,881,727,988	1,743,713,707,303
14	Kab. Sragen	2016	297,176,332,577	1,067,774,278,000	333,935,980,704	40,870,465,969	2,106,816,093,530
		2017	404,569,404,722	1,049,016,918,000	317,898,036,540	34,396,772,271	1,797,357,910,150
		2018	334,303,284,344	1,049,016,918,000	320,063,100,709	27,428,743,938	1,874,045,302,081
15	Kab. Grobogan	2016	299,211,316,168	1,110,337,027,000	322,988,008,150	56,510,215,649	1,967,739,525,055
		2017	440,456,238,668	1,091,590,533,000	383,277,149,862	47,730,176,649	2,127,940,209,859
		2018	315,743,175,974	1,094,450,434,000	385,401,361,674	40,960,700,086	1,968,732,976,648
16	Kab. Blora	2016	171,277,522,706	943,325,498,000	277,435,119,000	110,850,744,558	1,945,723,193,287
		2017	280,042,019,102	926,754,302,000	308,447,948,315	113,239,990,628	1,975,921,281,358
		2018	203,182,795,054	926,682,649,031	333,004,046,384	115,863,713,993	2,110,687,561,459
17	Kab. Rembang	2016	234,168,365,750	785,380,985,000	107,558,652,000	43,004,058,312	1,438,006,027,928
		2017	300,319,284,807	771,584,367,000	110,696,901,708	45,363,862,807	1,457,482,172,598
		2018	296,676,436,263	771,584,367,000	89,575,324,617	41,011,687,494	1,464,320,909,614
18	Kab. Pati	2016	314,921,084,791	1,207,508,997,000	42,066,300,000	44,349,751,185	2,071,848,000,283
		2017	449,831,345,800	1,186,296,947,000	44,047,154,742	39,792,642,741	2,071,726,133,897
		2018	384,041,845,939	1,189,796,870,000	414,061,984,957	33,452,113,433	2,118,304,525,311
19	Kab. Kudus	2016	279,239,106,717	822,153,771,000	228,303,262,665	240,510,038,401	1,927,792,219,453
		2017	366,031,203,778	807,711,173,000	257,168,272,384	246,044,588,085	1,773,405,620,296
		2018	337,364,609,424	807,056,990,772	239,054,267,051	235,660,116,745	1,719,107,548,945
20	Kab. Jepara	2016	322,509,753,285	1,000,373,359,000	339,310,214,684	37,816,608,184	1,893,756,485,921
		2017	325,530,346,533	982,800,016,000	291,552,492,911	35,996,027,453	1,899,703,524,898
		2018	369,330,454,700	984,914,973,687	314,882,423,372	39,836,895,561	1,953,640,728,788

21	Kab. Demak	2016	287,457,500,571	908,643,744,000	306,941,212,573	51,315,790,629	1,763,395,978,996
		2017	309,612,407,201	892,681,795,000	293,012,350,756	44,853,998,071	1,655,418,381,539
		2018	308,845,276,400	894,376,873,000	275,348,403,392	41,454,624,000	1,855,849,008,777
22	Kab. Semarang	2016	318,536,051,176	968,848,031,000	310,780,221,524	46,151,509,596	1,724,190,200,905
		2017	417,417,848,830	951,828,487,000	286,621,869,509	45,488,012,291	1,741,443,297,080
		2018	383,475,678,134	952,362,147,000	314,696,838,280	40,449,487,507	1,880,355,549,568
23	Kab. Temanggung	2016	281,328,148,970	807,995,010,000	199,009,572,278	55,551,255,814	1,468,230,608,125
		2017	308,466,748,340	793,801,136,000	227,597,740,094	56,049,200,647	1,428,210,413,585
		2018	252,019,934,778	793,485,677,000	225,548,811,404	50,075,868,022	1,327,852,634,858
24	Kab. Kendal	2016	265,074,406,548	972,952,576,000	228,131,891,000	62,908,768,657	1,681,658,043,185
		2017	404,978,613,972	955,860,928,000	249,296,332,799	52,926,605,486	1,746,984,182,399
		2018	335,892,237,024	956,331,079,388	295,942,730,376	47,528,989,206	1,806,153,332,142
25	Kab. Batang	2016	209,957,559,449	790,848,003,000	203,972,546,139	36,645,424,250	1,290,820,936,289
		2017	219,807,128,306	779,010,049,000	180,074,001,260	34,380,887,067	1,247,084,578,564
		2018	237,547,973,048	781,383,387,000	231,124,509,384	36,199,222,279	1,396,497,214,776
26	Kab. Pekalongan	2016	310,572,581,551	926,571,243,000	222,507,471,000	33,291,841,011	1,485,042,052,057
		2017	305,394,299,060	910,294,366,000	342,930,933,787	29,653,264,014	1,663,838,115,821
		2018	311,288,143,682	915,154,037,000	346,840,785,740	26,222,395,748	1,819,039,472,364
27	Kab. Pemalang	2016	275,458,054,016	1,197,916,501,000	270,426,675,208	39,469,913,885	1,843,048,079,592
		2017	425,893,266,850	1,176,872,960,000	343,530,726,398	33,915,644,126	1,896,830,515,438
		2018	300,481,887,079	1,180,834,332,000	331,768,131,456	30,766,210,113	1,900,327,954,512
28	Kab. Tegal	2016	316,051,189,733	1,162,102,111,000	290,589,280,983	40,792,559,417	2,070,201,492,705
		2017	375,531,165,351	1,141,687,714,000	325,623,713,089	38,360,380,613	2,056,964,445,808
		2018	372,282,676,055	1,144,494,182,000	339,287,872,985	29,401,275,289	2,127,372,729,068
29	Kab. Brebes	2016	339,156,063,168	1,339,381,605,000	361,801,358,000	45,826,698,841	2,946,269,402,281
		2017	523,660,773,731	1,317,061,804,000	400,887,743,562	36,642,276,057	2,319,952,315,323
		2018	346,907,972,510	1,321,798,057,000	398,599,759,143	32,660,114,961	2,281,596,326,765
30	Kota Magelang	2016	220,315,848,702	447,909,757,000	89,394,073,463	30,333,059,082	871,217,302,103
		2017	233,557,714,356	440,041,244,000	86,387,994,323	26,685,769,289	878,847,479,147
		2018	249,877,424,347	440,041,244,000	105,991,302,809	24,423,094,444	936,685,044,170
31	Kota Surakarta	2016	425,502,779,064	841,536,122,000	196,726,445,000	65,599,599,264	1,679,725,208,265
		2017	527,544,224,970	826,753,038,000	170,806,131,950	50,601,936,437	1,767,486,061,945
		2018	525,125,554,686	826,587,795,000	67,289,220,399	47,513,325,057	1,913,787,493,276

32	Kota Salatiga	2016	203,768,652,017	456,079,561,000	83,698,193,202	30,072,083,681	919,667,517,133
		2017	220,243,361,132	448,067,710,000	119,572,187,644	25,458,653,285	849,474,262,275
		2018	208,926,057,032	448,067,710,000	88,527,219,754	24,417,997,942	923,538,238,485
33	Kota Semarang	2016	1,491,645,900,065	1,211,708,204,000	246,886,746,970	185,682,778,746	3,931,802,540,351
		2017	1,791,886,378,674	1,190,422,387,000	272,523,251,395	178,032,651,519	4,327,861,480,841
		2018	1,821,274,103,250	1,190,422,387,000	79,584,094,202	168,784,359,874	4,505,423,372,044
34	Kota Pekalongan	2016	178,604,460,870	457,085,256,000	109,412,669,154	32,123,238,676	869,324,083,854
		2017	192,002,871,181	449,055,738,000	108,994,059,659	28,109,071,655	924,172,718,082
		2018	179,224,408,068	449,055,738,000	110,631,025,427	26,693,031,431	883,184,894,707
35	Kota Tegal	2016	287,343,889,954	490,772,001,000	165,828,134,725	31,599,100,470	1,074,082,617,386
		2017	306,830,656,134	482,150,715,000	133,603,234,143	29,186,187,399	1,016,537,313,307
		2018	275,021,448,594	482,150,715,000	94,845,070,521	25,571,473,848	916,079,821,600
Total			38,623,414,178,918	100,967,705,683,878	28,376,790,664,008	5,419,432,652,929	194,150,986,603,116

Lampiran 2

Uji Statistik Deskriptif

Deskripsi Variabel

```
DESCRIPTIVES VARIABLES=PAD DAU DAK DBH
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
```

Descriptives

[DataSet1] D:\Documents\Penelitian\SKRIPSI\data sampel jateng.sav

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	171277522706	1821274103250	367842039799.22	251225824048.481
DAU	105	440041244000	1398539653000	961597196513.12	245116718554.080
DAK	105	42066300000	483813446054	270255149181.03	109995314408.587
DBH	105	24417997942	246044588085	51613644313.61	42801580899.061
BelanjaDaerah	105	849474262275	4505423372044	1849057015267.77	620716180458.743
Valid N (listwise)	105				

Lampiran 3

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas (SPSS ver. 16.00)

```

NPAR TESTS
  /K-S (NORMAL) =RES_1
  /MISSING ANALYSIS.

```

NPar Tests

```
[DataSet1] D:\Documents\Penelitian\SKRIPSI\data sampel jateng.sav
```

```
[DataSet1] D:\Documents\Penelitian\SKRIPSI\data sampel jateng.sav
```

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^a	Mean	-.0000775
	Std. Deviation	173656459633.00366000
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		1.260
Asymp. Sig.		.084

a. Test distribution is Normal.

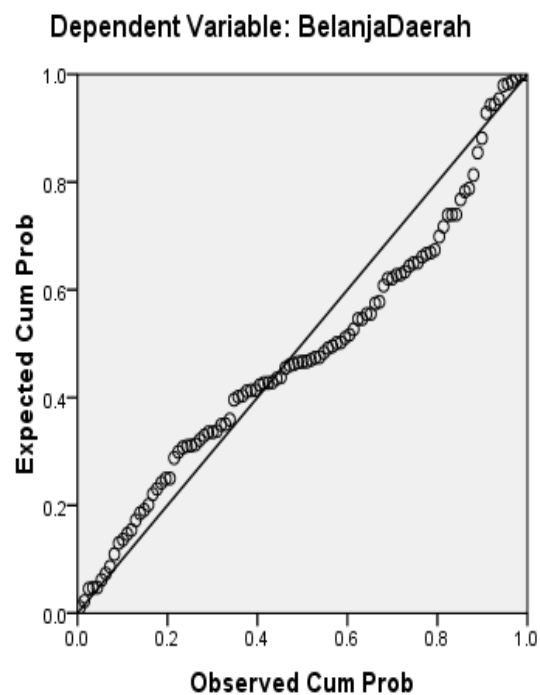
```

GET
  FILE='D:\Documents\Penelitian\SKRIPSI\data sampel jateng.sav'.
DATASET NAME DataSet0 WINDOW=FRONT.
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN
  /DEPENDENT BelanjaDaerah
  /METHOD=ENTER PAD DAU DAK DBH /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID).

```

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 4

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas (SPSS ver. 16.00)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DBH, DAU, PAD, DAK ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: abresid

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	-799198103.97958	464633273.81976		-1.720	.089			
PAD	-.093	.057	-.189	-1.635	.105	.061	-.161	-.148
DAU	.194	.072	.385	2.101	.081	.376	.261	.244
DAK	.065	.148	.058	.438	.662	.309	.044	.040
DBH	.614	.298	.213	2.058	.421	.161	.202	.186

a. Dependent Variable:

abresid

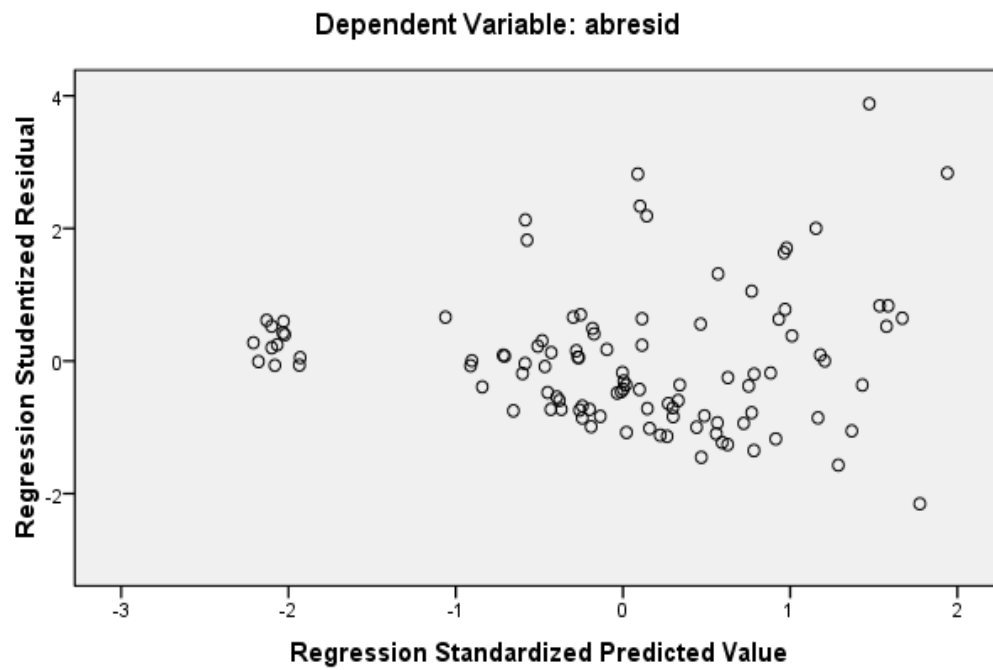
```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN
  /DEPENDENT BelanjaDaerah
  /METHOD=ENTER PAD DAU DAK DBH /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) .

```

Charts

Scatterplot



Lampiran 5

3. Hasil Uji Multikolineritas (SPSS ver. 16.00)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-84703152285.278	72398180260.298						
PAD	1.346	.088	.545	.801	.836	.426	.610	1.639
DAU	1.234	.112	.487	.774	.741	.309	.401	2.492
DAK	.544	.231	.096	.461	.229	.066	.469	2.134
DBH	2.041	.464	.141	.451	.402	.123	.763	1.310

a. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Lampiran 6

4. Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson (SPSS ver. 16.00)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics					Durbin-Watson
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.960 ^a	.922	.919	.922	294.407	4	100	.000	1.822

b. Dependent Variable:

BelanjaDaerah

Lampiran 7

Hasil Uji Hipotesis dan Hasil Uji Regresi Berganda : Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah dan Analisis Flypaper Effect

```
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT BelanjaDaerah

  /METHOD=ENTER PAD DAU DAK DBH.
```

Regression

[DataSet1] D:\Documents\Penelitian\SKRIPSI\data sampel jateng.sav

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
BelanjaDaerah	1849057015267.77	620716180458.743	105
PAD	367842039799.22	251225824048.481	105
DAU	961597196513.12	245116718554.080	105
DAK	270255149181.03	109995314408.587	105
DBH	51613644313.61	42801580899.061	105

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DBH, DAU, PAD, DAK ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Correlations

		BelanjaDaerah	PAD	DAU	DAK	DBH
Pearson Correlation	BelanjaDaerah	1.000	.801	.774	.461	.451
	PAD	.801	1.000	.377	.055	.480
	DAU	.774	.377	1.000	.694	.106
	DAK	.461	.055	.694	1.000	-.024
	DBH	.451	.480	.106	-.024	1.000
Sig. (1-tailed)	BelanjaDaerah	.	.000	.000	.000	.000
	PAD	.000	.	.000	.287	.000
	DAU	.000	.000	.	.000	.141
	DAK	.000	.287	.000	.	.405
	DBH	.000	.000	.141	.405	.
N	BelanjaDaerah	105	105	105	105	105
	PAD	105	105	105	105	105
	DAU	105	105	105	105	105
	DAK	105	105	105	105	105
	DBH	105	105	105	105	105

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.960 ^a	.922	.919	1.771E11	.922	294.407	4	100	.000

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.693E25	4	9.233E24	294.407	.000 ^a
	Residual	3.136E24	100	3.136E22		
	Total	4.007E25	104			

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	-84703152285.278	72398180260.298		-1.170	.245			
PAD	1.346	.088	.545	15.211	.000	.801	.836	.426
DAU	1.234	.112	.487	11.031	.000	.774	.741	.309
DAK	.544	.231	.096	2.357	.020	.461	.229	.066
DBH	2.041	.464	.141	4.395	.000	.451	.402	.123

a. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Hasil uji analisis *Flypapper Effect* :

Variables Entered/Removed ^b			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, PAD ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-31046224656.837	77858517713.815		-.399	.691
PAD	1.467	.083	.594	17.747	.000
DAU	1.394	.085	.550	16.452	.000

a. Dependent Variable: BelanjaDaerah

Lampiran 8

Tabel Produk Moment

Tabel r
Nilai – nilai r produk moment

N	Taraf signif		N	Taraf signif		N	Taraf signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,268	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,877	0,950	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,288
9	0,688	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	36	0,328	0,424	100	0,195	0,258
13	0,553	0,684	37	0,325	0,416	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,181
17	0,482	0,608	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	500	0,088	0,115
20	0,444	0,581	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	70	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,378	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			

Lampiran 9

Tabel Durbin Watson

Durbin-Watson Statistic: 5 Per Cent Significance Points of dL and dU

n	k'=1		k'=2		k'=3		k'=4		k'=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
30	1.134	1.264	1.070	1.339	1.006	1.421	0.941	1.510	0.877	1.606
31	1.147	1.274	1.085	1.345	1.022	1.425	0.960	1.509	0.897	1.601
32	1.160	1.283	1.100	1.351	1.039	1.428	0.978	1.509	0.917	1.597
33	1.171	1.291	1.114	1.358	1.055	1.432	0.995	1.510	0.935	1.594
34	1.184	1.298	1.128	1.364	1.070	1.436	1.012	1.511	0.954	1.591
35	1.195	1.307	1.141	1.370	1.085	1.439	1.028	1.512	0.971	1.589
36	1.205	1.315	1.153	1.376	1.098	1.442	1.043	1.513	0.987	1.587
37	1.217	1.322	1.164	1.383	1.112	1.446	1.058	1.514	1.004	1.585
38	1.227	1.330	1.176	1.388	1.124	1.449	1.072	1.515	1.019	1.584
39	1.237	1.337	1.187	1.392	1.137	1.452	1.085	1.517	1.033	1.583
40	1.246	1.344	1.197	1.398	1.149	1.456	1.098	1.518	1.047	1.583
45	1.288	1.376	1.245	1.424	1.201	1.474	1.156	1.528	1.111	1.583
50	1.324	1.403	1.285	1.445	1.245	1.491	1.206	1.537	1.164	1.587
55	1.356	1.428	1.320	1.466	1.284	1.505	1.246	1.548	1.209	1.592
60	1.382	1.449	1.351	1.484	1.317	1.520	1.283	1.559	1.248	1.598
65	1.407	1.467	1.377	1.500	1.346	1.534	1.314	1.568	1.283	1.604
70	1.429	1.485	1.400	1.514	1.372	1.546	1.343	1.577	1.313	1.611
75	1.448	1.501	1.422	1.529	1.395	1.557	1.368	1.586	1.340	1.617
80	1.465	1.514	1.440	1.541	1.416	1.568	1.390	1.595	1.364	1.624
85	1.481	1.529	1.458	1.553	1.434	1.577	1.411	1.603	1.386	1.630
90	1.496	1.541	1.474	1.563	1.452	1.587	1.429	1.611	1.406	1.636
95	1.510	1.552	1.489	1.573	1.468	1.596	1.446	1.618	1.425	1.641
100	1.522	1.562	1.502	1.582	1.482	1.604	1.461	1.625	1.441	1.647
150	1.611	1.637	1.598	1.651	1.584	1.665	1.571	1.679	1.557	1.693
200	1.664	1.684	1.653	1.693	1.643	1.704	1.633	1.715	1.623	1.725

Source: Tabel t is abridged from Tabel III of Fisher and Yates: Statistical Tabel for Economic, biological, agricultural, and medical reaserch, Published by Longman Group UK Ltd. London (Previosly published by Oliver Boyd Ltd. Edinbrough) and by permission of the authors

Lampiran 10

Tabel distribusi t ($df = 81-105$)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81		0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82		0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83		0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84		0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85		0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86		0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87		0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88		0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89		0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90		0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91		0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92		0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93		0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94		0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95		0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96		0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97		0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98		0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99		0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100		0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101		0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102		0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103		0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104		0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105		0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967

Lampiran 11

F tabel $\alpha = 5\%$

Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df2/df1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	INF
16	4.494	3.6337	3.2389	3.0069	2.8524	2.7413	2.6572	2.5911	2.5377	2.4935	2.4247	2.3522	2.0096
17	4.4513	3.5915	3.1968	2.9647	2.81	2.6987	2.6143	2.548	2.4943	2.4499	2.3807	2.3077	1.9604
18	4.4139	3.5546	3.1599	2.9277	2.7729	2.6613	2.5767	2.5102	2.4563	2.4117	2.3421	2.2686	1.9168
19	4.3807	3.5219	3.1274	2.8951	2.7401	2.6283	2.5435	2.4768	2.4227	2.3779	2.308	2.2341	1.878
20	4.3512	3.4928	3.0984	2.8661	2.7109	2.599	2.514	2.4471	2.3928	2.3479	2.2776	2.2033	1.8432
21	4.3248	3.4668	3.0725	2.8401	2.6848	2.5727	2.4876	2.4205	2.366	2.321	2.2504	2.1757	1.8117
22	4.3009	3.4434	3.0491	2.8167	2.6613	2.5491	2.4638	2.3965	2.3419	2.2967	2.2258	2.1508	1.7831
23	4.2793	3.4221	3.028	2.7955	2.64	2.5277	2.4422	2.3748	2.3201	2.2747	2.2036	2.1282	1.757
24	4.2597	3.4028	3.0088	2.7763	2.6207	2.5082	2.4226	2.3551	2.3002	2.2547	2.1834	2.1077	1.733
25	4.2417	3.3852	2.9912	2.7587	2.603	2.4904	2.4047	2.3371	2.2821	2.2365	2.1649	2.0889	1.711
26	4.2252	3.369	2.9752	2.7426	2.5868	2.4741	2.3883	2.3205	2.2655	2.2197	2.1479	2.0716	1.6906
27	4.21	3.3541	2.9604	2.7278	2.5719	2.4591	2.3732	2.3053	2.2501	2.2043	2.1323	2.0558	1.6717
28	4.196	3.3404	2.9467	2.7141	2.5581	2.4453	2.3593	2.2913	2.236	2.19	2.1179	2.0411	1.6541
29	4.183	3.3277	2.934	2.7014	2.5454	2.4324	2.3463	2.2783	2.2229	2.1768	2.1045	2.0275	1.6376
30	4.1709	3.3158	2.9223	2.6896	2.5336	2.4205	2.3343	2.2662	2.2107	2.1646	2.0921	2.0148	1.6223
40	4.0847	3.2317	2.8387	2.606	2.4495	2.3359	2.249	2.1802	2.124	2.0772	2.0035	1.9245	1.5089
60	4.0012	3.1504	2.7581	2.5252	2.3683	2.2541	2.1665	2.097	2.0401	1.9926	1.9174	1.8364	1.3893
120	3.9201	3.0718	2.6802	2.4472	2.2899	2.175	2.0868	2.0164	1.9588	1.9105	1.8337	1.7505	1.2539
inf	3.8415	2.9957	2.6049	2.3719	2.2141	2.0986	2.0096	1.9384	1.8799	1.8307	1.7522	1.6664	1

Lampiran 12

Data Keuangan Lampiran V (Perda APBD TA. 2018)

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Oktober 2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kode	Uraian	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
01	PELAYANAN UMUM	13.540.022.852.000	14.360.759.102.000	820.736.250.000	6,06
01.2.04	<i>Pangan</i>	34.121.005.000	34.901.598.000	780.593.000	2,29
01.2.07	<i>Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian</i>	62.958.824.000	69.743.053.000	6.784.229.000	10,78
01.4.01	<i>Administrasi Umum</i>	12.752.254.838.000	13.616.268.165.000	864.013.327.000	6,78
01.4.02	<i>Pengawasan</i>	43.316.221.000	43.855.508.000	539.287.000	1,25
01.4.03	<i>Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</i>	61.179.691.000	64.001.056.000	2.821.365.000	4,61
01.4.04	<i>Keuangan</i>	457.038.681.000	446.931.677.000	(10.107.004.000)	(2,21)
01.4.05	<i>Kepegawaian</i>	102.320.444.000	59.842.200.000	(42.478.244.000)	(41,51)
01.4.07	<i>Fungsi Lainnya</i>	26.833.148.000	25.215.845.000	(1.617.303.000)	(6,03)

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	98.308.815.000	100.071.448.000	1.762.633.000	1,79
03.1.05	<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>	98.308.815.000	100.071.448.000	1.762.633.000	1,79
04	EKONOMI	1.104.305.245.000	1.107.031.507.000	2.726.262.000	0,25
04.2.01	<i>Tenaga Kerja</i>	117.707.191.000	118.093.300.000	386.109.000	0,33
04.2.06	<i>Perhubungan</i>	127.134.837.000	126.479.392.000	(655.445.000)	(0,52)
04.2.08	<i>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</i>	74.106.295.000	77.835.798.000	3.729.503.000	5,03
04.2.09	<i>Penanaman Modal</i>	31.707.391.000	31.707.391.000	-	0,00
04.3.01	<i>Kelautan dan Perikanan</i>	127.626.449.000	128.413.306.000	786.857.000	0,62
04.3.02	<i>Pertanian</i>	437.459.439.000	436.072.943.000	(1.386.496.000)	(0,32)
04.3.03	<i>Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	90.929.902.000	91.672.145.000	742.243.000	0,82
04.3.04	<i>Perindustrian dan Perdagangan</i>	97.633.741.000	96.757.232.000	(876.509.000)	(0,90)
05	LINGKUNGAN HIDUP	218.082.682.000	214.920.982.000	(3.161.700.000)	(1,45)
05.2.03	<i>Lingkungan Hidup</i>	218.082.682.000	214.920.982.000	(3.161.700.000)	(1,45)
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.269.615.275.000	1.160.229.502.000	(109.385.773.000)	(8,62

Kode	Uraian	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
06.1.03	<i>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>	1.234.324.993.000	1.124.752.214.000	(109.572.779.000)	(8,88)
06.1.04	<i>Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman</i>	35.290.282.000	35.477.288.000	187.006.000	0,53
07	KESEHATAN	2.245.965.810.000	2.615.396.387.000	369.430.577.000	16,45
07.1.02	<i>Kesehatan</i>	2.245.965.810.000	2.615.396.387.000	369.430.577.000	16,45
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	-	-	-	0,00
10	PENDIDIKAN	6.185.523.395.000	6.288.892.766.000	103.369.371.000	1,67
10.1.01	<i>Pendidikan dan Kebudayaan</i>	5.725.241.942.000	5.833.038.809.000	107.796.867.000	1,88
10.2.10	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>	327.700.154.000	323.200.133.000	(4.500.021.000)	(1,37)
10.2.11	<i>Perpustakaan dan Kearsipan</i>	43.017.767.000	43.568.845.000	551.078.000	1,28
10.4.06	<i>Pendidikan dan Pelatihan</i>	89.563.532.000	89.084.979.000	(478.553.000)	(0,53)
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	331.835.784.000	339.285.635.000	7.449.851.000	2,25
11.1.06	<i>Sosial</i>	258.975.520.000	262.637.791.000	3.662.271.000	1,41
11.2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	30.247.060.000	30.380.484.000	133.424.000	0,44
11.2.05	<i>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>	42.613.204.000	46.267.360.000	3.654.156.000	8,58
Jumlah		24.993.659.858.000	26.186.587.329.000	1.192.927.471.000	4,77

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

